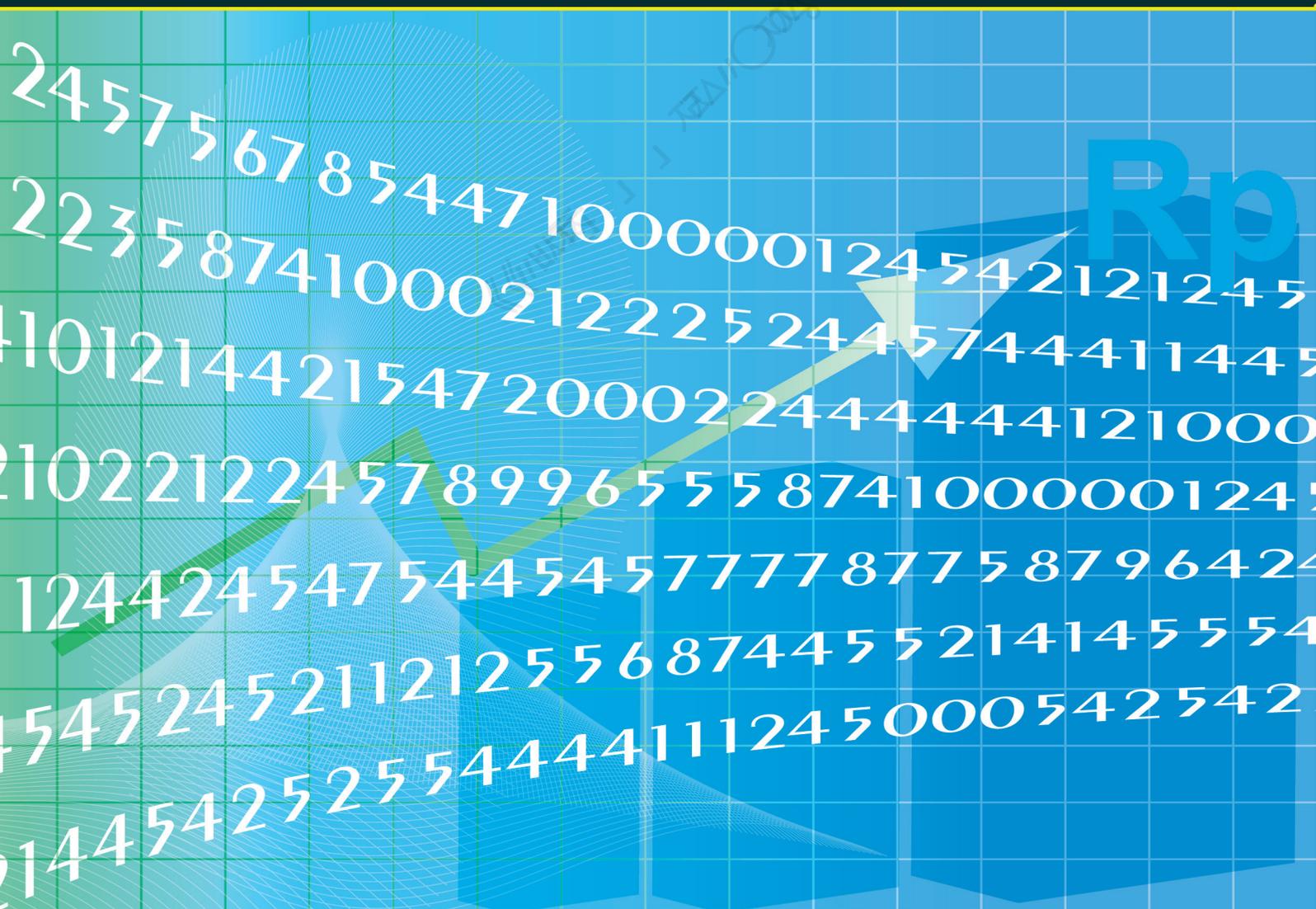




Katalog BPS: 9302004

Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan 2008-2013



BADAN PUSAT STATISTIK

Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan

2008-2013



Produk Domestik Bruto menurut Penggunaan 2008-2013

ISSN: 1979-8776

No. Publikasi: 07240.1401

Katalog BPS: 9302004

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: viii + 98 halaman

Naskah:

Konsolidasi Neraca Pengeluaran

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah. Namun, perangkat data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, bahkan digunakan sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat peredaran uang, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan produksi/penyediaan (PDB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDB menurut Penggunaan/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDB yang sama.

Pada publikasi “Produk Domestik Bruto Menurut Penggunaan 2008 – 2013” secara khusus dibahas PDB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Adapun rincian komponennya terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto Barang dan Jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi dengan impor barang dan jasa).

Kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga publikasi PDB ini banyak memberikan manfaat bagi para pengguna. Saran dan kritik sangat diharapkan agar publikasi PDB ini disajikan dengan lebih baik di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2014

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



Dr. SURYAMIN, M.Sc.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	7
Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	9
Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Tahun 2008-2013.....	12
Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013	13
Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	15
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2008-2013.....	18
Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Tahun 2008-2013.....	20
Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Tahun 2008-2013.....	23
Tabel 9. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia Tahun 2008-2013.....	26

Tabel 10.	Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Indonesia Tahun 2008-2013.....	32
Tabel 11.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Tahun 2008-2013	34
Tabel 12.	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2008-2013.....	36
Tabel 13.	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Tahun 2008-2013.....	39
Tabel 14.	PDB dan PDB Perkapita Tahun 2008-2013.....	42
Tabel 15.	PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposable Nasional Perkapita Tahun 2008-2013.....	46
Tabel 16.	<i>Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save</i> Tahun 2008-2013.....	49
Tabel 17.	Perbandingan PDB Penggunaan untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Tahun 2008-2013.....	50
Tabel 18.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2008-2013.....	51
Tabel 19.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDB Tahun 2008-2013.....	52
Tabel 20.	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2008-2013.....	53
Tabel 21.	Rasio PDB terhadap Impor Tahun 2008-2013.....	54
Tabel 22.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Tahun 2008-2013.....	55

Tabel 23.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Tahun 2008-2013.....	57
Tabel 24.	Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2008-2013.....	58
Tabel 25.	Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2008-2013.....	59
Tabel 26.	Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposable PDB Tahun 2008-2013.....	60
Tabel 27.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Tahun 2008-2013	62

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	8
Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000 (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013	10
Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB dan ADHK 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	11
Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013	12
Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2000) Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008-2013.....	14

BAB I PENDAHULUAN

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaan dan PDB menurut lapangan usaha merupakan suatu bentuk tampilan data ekonomi makro, di samping bentuk tampilan lain seperti Tabel Input-Output (I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana (NAD). PDB penggunaan merupakan ukuran dasar (*basic measure*) atas penggunaan barang dan jasa atau produk yang dihasilkan melalui proses produksi. Dalam konteks tersebut, ukuran PDB dapat menggambarkan aktivitas dan hasil akhir dari suatu proses produksi yang berlangsung di dalam batas-batas teritori suatu negara atau wilayah. Berbagai agregat yang dapat diturunkan dari PDB, di antaranya adalah permintaan konsumsi akhir, pembentukan modal tetap atau investasi fisik, ekspor dan impor. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut, ditujukan untuk memenuhi permintaan akhir berbagai pelaku atau sektor ekonomi domestik maupun luar negeri.

Penghitungan PDB melalui pendekatan penggunaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghitungan PDB melalui pendekatan lapangan usaha (industri), yang ditampilkan dalam suatu kerangka kerja data ekonomi. Sungguhpun demikian, penghitungan PDB penggunaan dilakukan secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDB lapangan usaha lebih menjelaskan tentang proses produksi, serta pendapatan faktor yang berhasil diciptakan (balas jasa faktor produksi)¹, sedangkan PDB penggunaan menjelaskan tentang pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Selain itu, melalui komponen penggunaan atau permintaan akhir (*final demand*) atau disebut sebagai PDB menurut pengeluaran, juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa dari

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

domestik maupun impor (*supply side*). Melalui hubungan ini akan lebih mudah terlihat titik keseimbangan makro antara sisi “penyediaan dan permintaan”.

Secara konsep dijelaskan² bahwa, penghitungan PDB dari sisi yang berbeda dimaksudkan untuk : i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat perkiraan atau estimasi; ii) dapat memberi manfaat lebih dalam melakukan analisis PDB; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Meskipun secara teoritis kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*), tetapi karena perbedaan dalam pendekatan estimasi maupun metoda pengukuran, bilamana terjadi selisih atau diskrepansi statistik merupakan hal yang wajar.

Dengan demikian maka PDB penggunaan (*expenditure*) menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi “akhir” masyarakat. Secara spesifik yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan produk dalam bentuk barang atau jasa yang tujuannya tidak untuk diproses lebih lanjut (atau dikonsumsi habis), yang direalisasikan dalam bentuk konsumsi akhir rumah tangga (termasuk lembaga non-profit yang melayani rumah tangga atau LNPR), konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori, serta ekspor.

Di sisi lain, dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari negara lain (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya terkandung produk impor. Sehingga untuk mengukur besaran nilai tambah domestik (PDB), komponen impor harus dikeluarkan atau dikurangkan dari hasil penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan yang tidak selalu

2 *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

diimbangi oleh penyediaan domestik, menjadi peluang masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa perdagangan produk impor terus berkembang dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDB lapangan usaha (Y) punya total nilai yang sama besar dengan PDB penggunaan (E), namun di dalam kenyataan tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antara keduanya juga berbeda. Dalam penyajian-nya, perbedaan tersebut diletakkan pada sisi PDB penggunaan, yang kemudian disebut sebagai perbedaan statistik (*statistical discrepancy*). Unsur yang menyebabkan terjadi perbedaan, di antaranya adalah basis dan konsep pengukuran, metoda pendekatan, cakupan ukuran, serta sumber data yang digunakan. Adanya perbedaan tersebut diharapkan tidak menjadi masalah bagi para pengguna data PDB.

Penghitungan PDB dari sisi **penggunaan**, dimaksudkan juga untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui berbagai ragam proses produksi (atau lapangan usaha) menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang pada gilirannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir. Atau pada sisi yang berbeda, PDB menurut penggunaan juga menjelaskan tentang penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Hubungan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran untuk pembelian berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor (termasuk di ekspor) merupakan bentuk analisis sederhana atas PDB, ditinjau dari dua pendekatan tersebut. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (Income)	= PDB (lapangan usaha)
C (Consumption)	= Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan bahwa, pendapatan atau nilai tambah yang diperoleh dari penghitungan PDB menurut lapangan usaha “identik” dengan PDB menurut penggunaan. Apabila Y adalah pendapatan dan C adalah konsumsi akhir, kemudian GFCF serta Δ Inventori menggambarkan investasi (fisik), maka selisih ekspor dikurangi impor mengekspresikan surplus atau defisit yang berasal dari perdagangan berbagai barang dan jasa dengan luar negeri. Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi akhir atau juga untuk investasi (khususnya fisik). Selain itu juga dapat diketahui seberapa besar ketergantungan ekonomi domestik (wilayah) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dengan impor disebut sebagai “ekspor neto” yang juga memberikan gambaran tentang tabungan luar negeri.

Sama halnya dengan pendekatan lapangan usaha, PDB sisi permintaan atau penggunaan akhir juga menurunkan agregat ekonomi makro seperti nilai nominal, struktur, komposisi atau distribusi penggunaan akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks

harga implisit masing-masing komponen maupun keseluruhan PDB (E). Selain menurut masing-masing komponen penggunaan, pada publikasi ini juga disajikan beberapa agregat makro lain yang berkaitan erat dengan PDB, seperti Pendapatan Nasional (*National Income*). Angka Pendapatan Nasional merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Selain itu disajikan juga data PDB per-kapita, untuk melihat ukuran pemerataan, baik rata-rata tingkat produktivitas, maupun tingkat kemakmuran masyarakat, secara individu.

Untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan PDB sisi penggunaan dari waktu ke waktu, disajikan pula data runtun waktu (*time series*) dalam bentuk angka indeks (indeks berantai maupun perkembangan) dari masing-masing komponen penggunaan akhir, berikut agregat turunannya. Indeks berantai bermanfaat untuk melihat perubahan volume maupun harga antar dua titik waktu yang berurutan, sedangkan indeks perkembangan untuk melihat perubahan volume maupun harga secara kumulatif dalam satu periode tertentu. Indikator tersebut diturunkan dari hasil perhitungan PDB atas dasar harga Berlaku (*adh Berlaku*) maupun atas dasar harga konstan (*adh Konstan*) 2000, dari tahun 2000 s.d 2013.

《《H/8/5 1 1 8/1/10/1 7/1/1》》

BAB II

TINJAUAN AGREGAT PDB INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2008 – 2013

Kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui pertumbuhan pada sektor produksi (*supply side*), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan didominasi oleh pertumbuhan di sektor pengangkutan dan komunikasi, sedangkan di sisi penggunaan lebih diwarnai oleh pertumbuhan konsumsi pemerintahan. Kegiatan ekspor dan impor (yang semakin membesar), juga mempunyai peranan yang tidak kalah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

**Tabel 1. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2013**

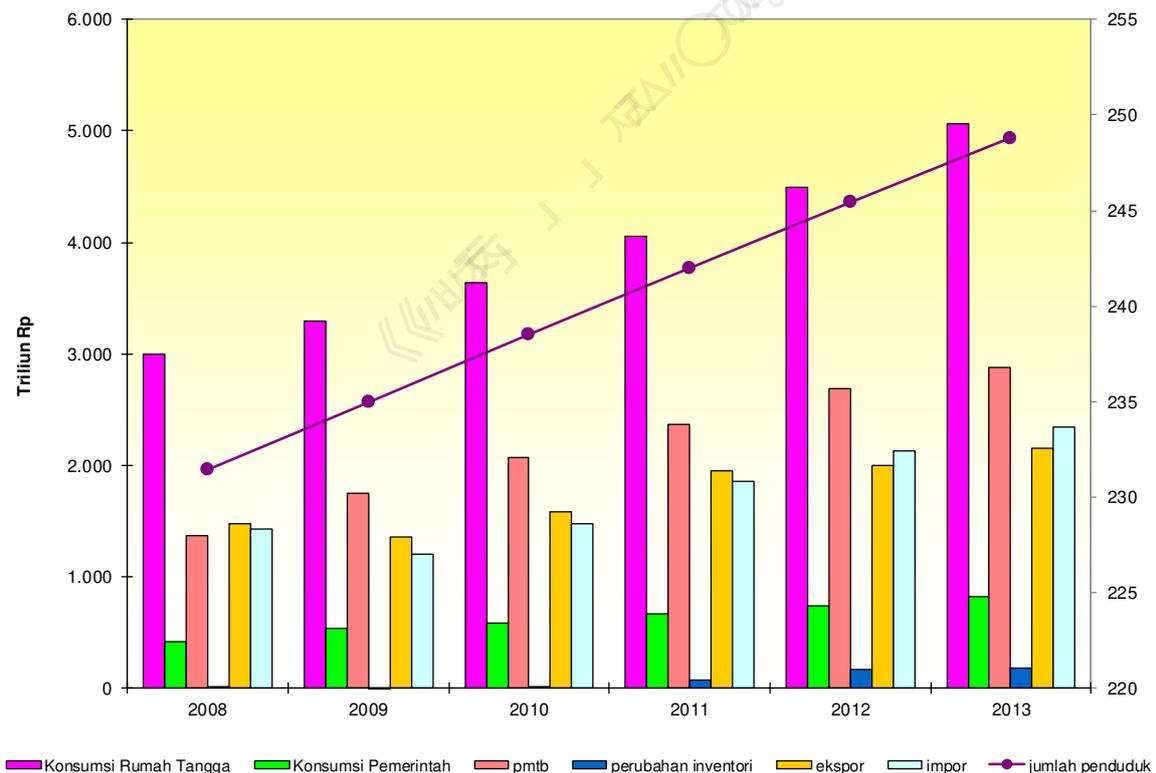
Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
2. Konsumsi Pemerintah	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
3. PMTB	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,1	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
4. Perubahan Inventori	5.822,3	-7.264,2	18.364,4	70.774,2	170.309,6	179.778,1
5. Ekspor	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
6. Impor	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
Total PDB	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
Diskrepani Statistik ⁴	103.108,5	-116.790,9	24.732,0	151.025,2	269.075,0	310.913,8

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

⁴ Perbedaan antara total PDB Lapangan Usaha dan PDB Penggunaan

Setiap tahun, nilai PDB Indonesia (adh Berlaku) selama periode tahun 2008 s.d 2013 menunjukkan peningkatan signifikan, yakni berturut-turut sebesar 4.948.688,4 miliar Rupiah (2008); 5.606.203,4 milyar Rupiah (2009); 6.446.851,9 miliar Rupiah (2010); 7.419.187,1 miliar Rupiah (2011); 8.229.439,4 miliar rupiah (2012) dan 9.083.972,3 miliar Rupiah (2013). Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau penggunaan PDB (*demand side*) yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam publikasi ini.

**Grafik 1. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2008 - 2013**



Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDB menurut penggunaan juga dapat dinilai adh Konstan 2000 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2000. Melalui pendekatan penghitungan itu, maka PDB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDB secara volume atau secara

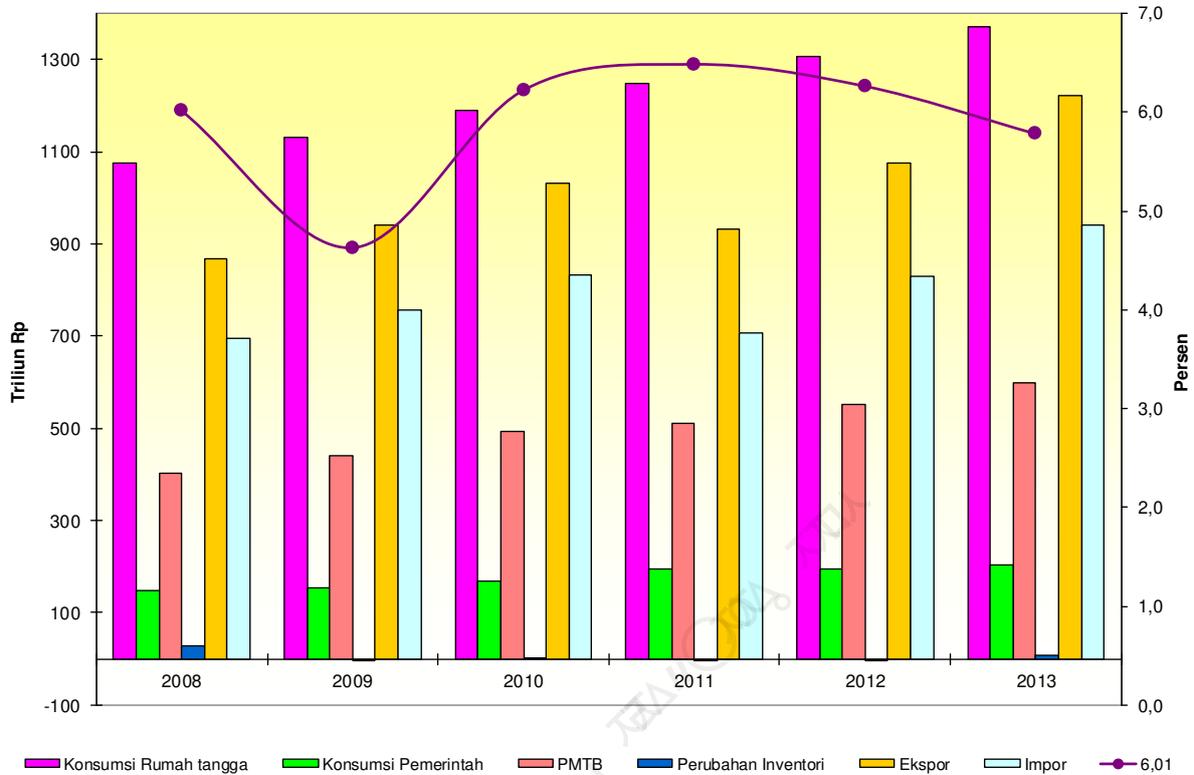
kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDB komponen penggunaan adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2008–2013, gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2. Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	(Miliar Rp)					
	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.191.190,8	1.249.070,1	1.308.272,8	1.369.881,1	1.442.193,2	1.518.393,4
2. Konsumsi Pemerintah	169.297,2	195.834,4	196.468,8	202.794,9	205.385,9	215.393,1
3. PMTB	493.822,3	510.085,9	553.347,7	599.505,5	657.589,1	688.559,8
4. Perubahan Inventori	2.170,4	-2.065,2	-604,4	9.033,5	50.371,4	53.767,6
5. Ekspor	1.032.277,8	932.248,6	1.074.568,7	1.221.229,0	1.245.702,0	1.311.759,6
6. Impor	833.342,2	708.528,8	831.418,3	942.297,3	1.005.036,0	1.017.190,8
Total PDB	2.082.456,1	2.178.850,3	2.314.458,8	2.464.566,1	2.618.938,4	2.770.345,1
Diskrepansi Statistik	27.039,9	2.205,3	13.823,5	4.419,3	22.732,8	-337,7

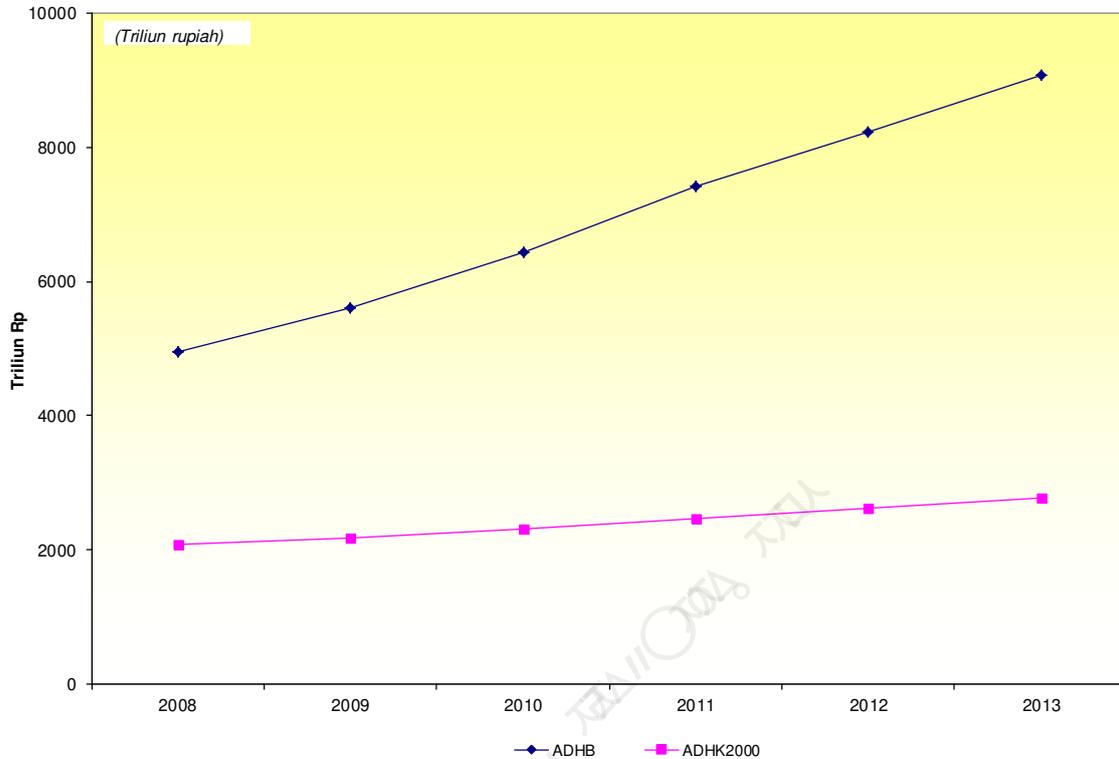
Keterangan : * sementara ** sangat sementara

**Grafik 2. Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2000
Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2013**



Dari grafik di atas, nampak bahwa umumnya nilai PDB adh Berlaku selalu lebih tinggi dari nilai PDB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDB adh Berlaku, sedangkan dalam PDB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Sama halnya dengan PDB adh Berlaku, seluruh komponen penggunaan akhir PDB adh Konstan menunjukkan peningkatan.

Grafik 3. Perbandingan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku dan adh Konstan 2000 Menurut Penggunaan Tahun 2008 - 2013



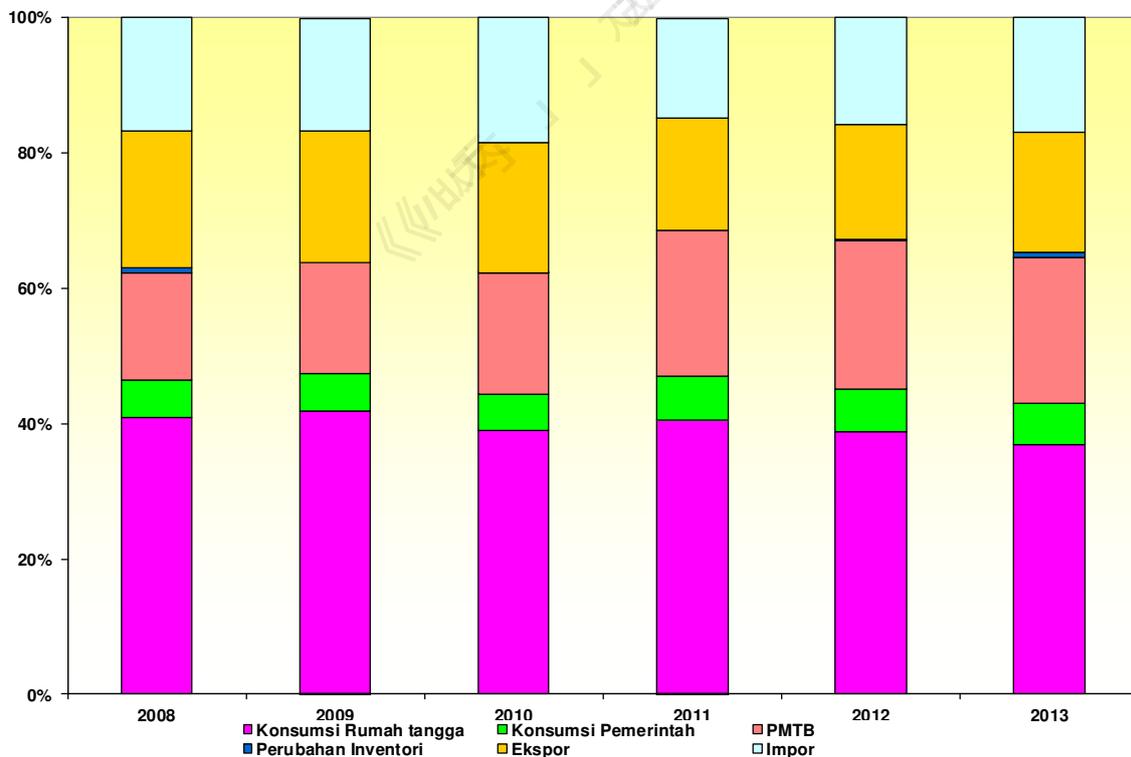
Terbentuknya keseluruhan PDB atau total PDB merupakan kontribusi dari seluruh komponen penggunaannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor. Terlihat bahwa selama periode 2008 - 2013, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 24 s.d 30 persen produk Indonesia mampu menembus pasar internasional; demikian halnya impor masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 21 s.d 29 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Di sisi lain, pengeluaran untuk modal (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 28 s.d 33 persen.

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia ADHB Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2013

Uraian	(persen)					
	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	60,62	58,70	56,51	54,63	54,64	55,82
2. Konsumsi Pemerintah	8,42	9,59	9,11	9,02	8,91	9,11
3. PMTB	27,70	31,11	32,03	31,95	32,67	31,66
4. Perubahan Inventori	0,12	-0,13	0,28	0,95	2,07	1,98
5. Ekspor	29,81	24,16	24,58	26,36	24,29	23,74
6. Impor	28,75	21,35	22,90	24,95	25,86	25,74
Total PDB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Diskrepansi Statistik	2,08	-2,08	0,38	2,04	3,27	3,42

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Grafik 4. Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia adh Berlaku Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 - 2013



Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 8,42 - 9,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2008-2011 perdagangan internasional Indonesia

yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih tinggi dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan internasional Indonesia dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “surplus” atau menguntungkan. Sedangkan pada tahun 2012-2013 perdagangan internasional Indonesia menunjukkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai impor yang menunjukkan dalam kondisi “defisit” atau merugi.

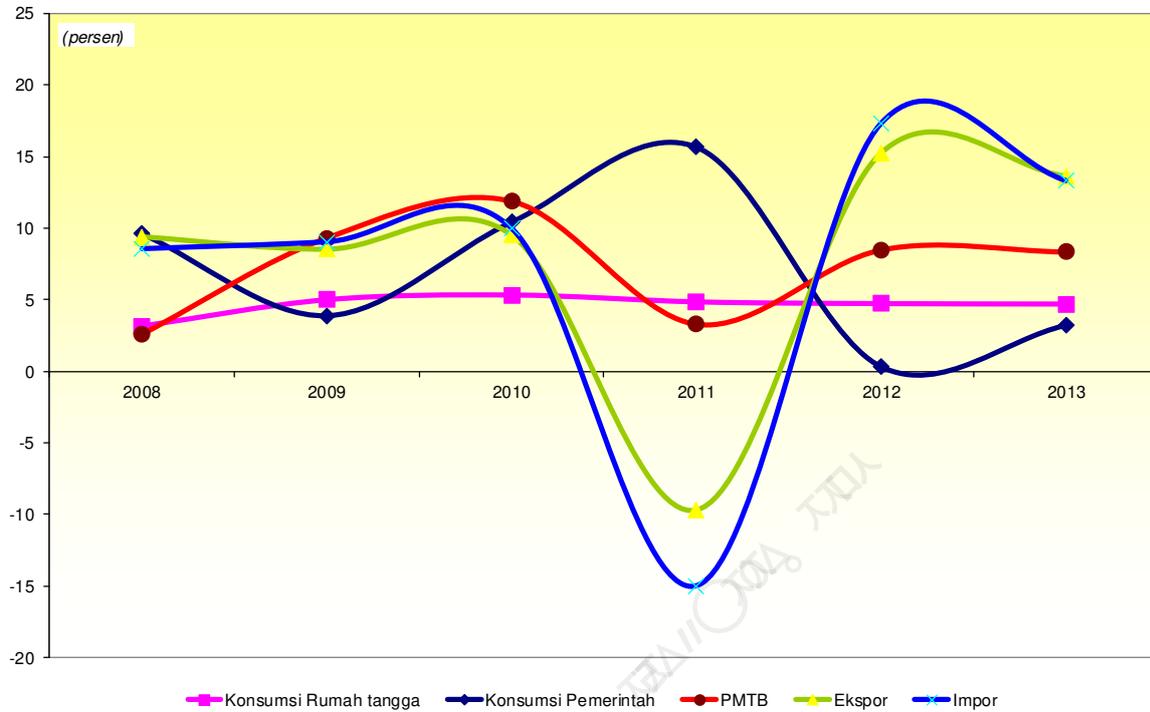
**Tabel 4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia ADHK 2000 Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2008 – 2013**

Uraian	(persen)					
	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,34	4,86	4,74	4,71	5,28	5,28
2. Konsumsi Pemerintah	10,43	15,67	0,32	3,22	1,28	4,87
3. PMTB	11,89	3,29	8,48	8,34	9,69	4,71
4. Ekspor	9,53	-9,69	15,27	13,65	2,00	5,30
5. Impor	10,00	-14,98	17,34	13,34	6,66	1,21
Total PDB	6,01	4,63	6,22	6,49	6,26	5,78

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDB adalah pertumbuhan riil PDB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2008 s.d 2013 secara rata-rata mencapai 5,99 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 6,01 persen (2008); 4,63 persen (2009); 6,22 persen (2010); 6,49 persen (2011); 6,26 persen (2012) dan 5,78 persen (2013). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 6,49 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2009 (4,63 persen).

**Grafik 5. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia adh Konstan 2000
Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2008 - 2013**



Sementara itu, indeks implisit⁵ PDB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Kumulatif kenaikan harga PDB yang terjadi sepanjang tahun 2008 - 2013 adalah sebesar 227,90 persen.

⁵ Indeks perkembangan

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut
Komponen Penggunaan Tahun 2008 - 2013**

U r a i a n	<i>(persen)</i>					
	2008	2009	2010	2011	2012*	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	251,85	263,48	278,49	295,89	311,77	333,98
2. Konsumsi Pemerintah	246,23	274,51	298,92	329,89	357,02	384,06
3. PMTB	277,57	341,97	373,18	395,37	408,90	417,72
4. Ekspor	142,90	145,28	147,47	160,15	160,49	164,42
5. Impor	170,75	168,95	177,60	196,44	211,71	229,86
Total PDB	237,64	257,30	278,55	301,03	314,23	327,90

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

BAB III

PERKEMBANGAN MASING-MASING KOMPONEN PDB MENURUT PENGGUNAAN TAHUN 2008 - 2013

Perubahan struktur ekonomi Indonesia akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2008 s.d 2013, tidak terlepas dari dua faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen penggunaan akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen penggunaan mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga (termasuk lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT) dan pemerintah, kemudian sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen penggunaan itu diuraikan pada bagian berikut.

3.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Konsumsi akhir rumah tangga (termasuk LNPRT) merupakan porsi terbesar dalam penggunaan akhir berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari domestik maupun impor. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah (PDB) yang diciptakan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga, dengan kata lain bahwa sebagian besar dari produk domestik yang dihasilkan di Indonesia dan produk impor yang didatangkan dari luar negeri akan digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Fungsi rumah tangga yang utama adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) dari barang dan jasa yang tersedia, termasuk pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama), serta LNPRT. Dengan demikian, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yang dimaksud termasuk pula pengeluaran konsumsi oleh lembaga tersebut. Selanjutnya, konsumsi akhir rumah tangga secara garis besar dibedakan menurut dua kelompok yang utama, yaitu kelompok makanan dan non makanan. Pengelompokan ini semata-mata berdasarkan pada kebutuhan pokok rumah tangga yang berlaku secara umum.

**Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi RT						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	1.191.190,8	1.249.070,1	1.308.272,8	1.369.881,1	1.442.193,2	1.518.393,4
Proporsi terhadap PDB						
(% - ADHB)	60,62	58,70	56,51	54,63	54,64	55,82
Rata-rata konsumsi per-RT						
per-tahun (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	50.366,0	54.425,0	59.355,0	65.105,0	71.230,8	79.262,5
b. ADHK 2000	19.998,8	20.656,6	21.313,1	22.003,0	22.847,0	23.732,9
Rata-rata konsumsi per-						
kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	12.961,9	14.006,5	15.275,2	16.750,1	18.320,7	20.380,7
b. ADHK 2000	5.146,8	5.316,0	5.485,0	5.660,9	5.876,3	6.102,4
Pertumbuhan ⁶						
a. Total konsumsi RT	5,34	4,86	4,74	4,71	5,28	5,28
b. Per-RT	3,36	3,29	3,18	3,24	3,84	3,88
c. Perkapita	3,74	3,29	3,18	3,21	3,81	3,85
Jumlah RT (<i>unit</i>)	59.563.087	60.468.453	61.383.620	62.258.871	63.123.963	63.978.502
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	231.445	234.963	238.519	241.991	245.425	248.818

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data berikut, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2008 – 2013 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada periode tahun 2008 s.d 2013 cukup fluktuatif, mulai dari 60,62 persen (2008); 58,70 persen (2009); 56,51 persen (2010); 54,63 persen (2011); 54,64 persen (2012) dan 55,82 persen (2013). Titik tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 60,62 persen pada titik terendah pada tahun 2011 yaitu 54,63 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2000*. Pada tahun 2008, secara umum setiap rumah tangga di Indonesia menghabiskan dana sekitar 50.366,0 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 54.425,0 ribu rupiah (2009); 59.355,0 ribu rupiah (2010); 65.105,0 ribu rupiah (2011); 71.230,8 ribu rupiah (2012) dan menjadi 79.262,5 ribu rupiah (2013). Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan (2000)* rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 3,88 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai

konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2000. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Indonesia meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3,18 s.d 3,85 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

**Tabel 7. Struktur dan Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Struktur Konsumsi Akhir RT ⁷						
a. Makanan (<i>Miliar Rp</i>)	1.425.559,2	1.561.875,1	1.733.801,3	1.926.165,8	2.141.214,7	2.422.627,3
(%)	(47,52)	(47,46)	(47,59)	(47,52)	(47,62)	(47,77)
b. Bukan-makanan(<i>Miliar Rp</i>)	1.574.397,7	1.729.120,8	1.909.623,7	2.127.197,8	2.355.158,7	2.648.467,1
(%)	(52,48)	(52,54)	(52,41)	(52,48)	(52,38)	(52,23)
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Indeks Perkembangan (ADHB) ⁸						
a. Makanan	314,46	344,53	382,46	424,89	472,33	534,40
b. Bukan-makanan	390,22	428,57	473,30	527,23	583,73	656,43
Total Konsumsi	350,14	384,10	425,24	473,08	524,79	591,87
Pertumbuhan riil (ADHK)						
a. Makanan	4,31	3,57	3,60	3,75	4,30	4,39
b. Bukan-makanan	6,24	5,98	5,70	5,50	6,08	6,00
Total Konsumsi	5,34	4,86	4,74	4,71	5,28	5,28
Pertumbuhan implisit (indeks harga) ⁹						
a. Makanan	15,07	5,79	7,15	7,08	6,58	8,38
b. Bukan-makanan	12,03	3,63	4,48	5,58	4,37	6,09
Total Konsumsi	13,44	4,62	5,70	6,25	5,37	7,12

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

7 Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

8 Perbandingan terhadap tahun dasar (2000)

9 Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan sebesar 5,34 persen pada tahun 2008. Kemudian, menurun pada tiga tahun berikutnya yaitu berturut-turut sebesar 4,86 persen (2009), 4,74 persen (2010), dan 4,71 persen (2011). Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 konsumsi rumah tangga tumbuh stabil yaitu sebesar 5,28 persen. Sementara itu, konsumsi per-kapita menurun dari 3,74 persen (2008) menjadi 3,29 persen (2009) dan 3,18 persen (2010). Namun pada tahun berikutnya meningkat kembali yaitu menjadi 3,21 persen (2011), 3,81 persen (2012) dan 3,85 persen (2013). Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDB ini.

Secara rata-rata dari tahun 2008 s.d 2013, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Indonesia, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 47,52 persen (2008) ; 47,46 persen (2009) ; 47,59 persen (2010) ; 47,52 persen (2011) ; 47,62 persen (2012) dan 47,77 persen (2013). Kondisi ini juga dapat ditunjukkan melalui besaran indeks perkembangan, di mana pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan menunjukkan fluktuasi yang sama.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi,

jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 6,24 persen (2008); 5,98 persen (2009) ; 5,70 persen (2010) ; 5,50 persen (2011) ; 6,08 persen (2012) dan 6,00 persen (2013). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam perangkat data tersebut, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya, baik untuk kelompok makanan maupun bukan makanan. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2008, namun pada tahun-tahun berikutnya peningkatan harga relatif stabil. Rincian peningkatan harga makanan sebesar 15,07 persen (2008) ; 5,79 persen (2009) ; 7,15 persen (2010) ; 7,08 persen (2011); 6,58 persen (2012) dan 8,38 persen (2013). Sementara itu, konsumsi rumah tangga bukan makanan menurun dari menjadi 12,03 persen (2008) menjadi 3,63 persen (2009). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 4,48 persen (2010); 5,58 persen (2011); 4,37 persen (2012) dan 6,09 persen (2013). Pada periode tahun 2008 s.d 2013, harga kelompok makanan meningkat lebih tinggi dari kelompok bukan makanan.

3.2. Konsumsi Akhir Pemerintah

Konsumsi akhir pemerintah mencakup berbagai pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan berbagai produk barang dan jasa, baik dari hasil produksi domestik maupun impor. Pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah pusat

maupun daerah untuk menunjang aktivitasnya, meliputi pengeluaran untuk belanja barang, belanja pegawai, serta penyusutan.¹⁰ Jika komponen belanja pegawai ini ditambah dengan penyusutan maka akan sama dengan Nilai Tambah Bruto (NTB) pemerintah menurut pendekatan produksi (lapangan usaha). Kemudian, jika total pengeluaran pemerintah di atas dikurangi dengan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang dan jasa, maka akan sama dengan Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah. Sebagai catatan, bahwa penerimaan pemerintah dari hasil penjualan barang dan jasa bukan bagian dari konsumsi akhir pemerintah.

**Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi Pemerintah						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	169.297,2	195.834,4	196.468,8	202.794,9	205.385,9	215.393,1
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	8,42	9,59	9,11	9,02	8,91	9,11
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	1.801,2	2.288,0	2.462,2	2.764,6	2.987,8	3.324,7
b. ADHK 2000	731,5	833,5	823,7	838,0	836,9	865,7
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)						
a. ADHB	102.089,1	118.825,0	127.723,0	146.363,4	164.116,5	189.612,6
b. ADHK 2000	41.460,3	43.285,9	42.728,3	44.367,3	45.968,4	49.370,3
Pertumbuhan ¹¹						
a. Total konsumsi pemerintah	10,43	15,67	0,32	3,22	1,28	4,87
b. Konsumsi perkapita	8,75	13,94	-1,17	1,74	-0,14	3,44
c. Konsumsi per-pegawai	9,99	4,40	-1,29	3,84	3,61	7,40
Jumlah Pegawai Pemerintah ¹²	4.083.360	4.524.205	4.598.100	4.570.818	4.467.982	4.362.805
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	231.445	234.963	238.519	241.991	245.425	248.818

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

¹⁰ Nilai imputasi

¹¹ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

¹² Tidak termasuk polisi dan militer

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2000*. Pada tahun 2008 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah sebesar 416.866,7 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya sebesar 537.588,8 miliar rupiah (2009), 587.282,9 miliar rupiah (2010), 669.000,6 miliar rupiah (2011), 733.269,4 miliar rupiah (2012) dan 827.242,8 miliar rupiah (2013). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan 2000*, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDB juga mengalami peningkatan, dari yang hanya 8,42 persen (tahun 2008) hingga mencapai 9,11 persen (tahun 2013). Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 8,42 persen ; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2009 yang mencapai 9,59 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk belanja barang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsumsi akhir pemerintah juga menjadi salah unsur pendorong dalam meningkatkan besaran nilai PDB.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2008 konsumsi pemerintah per-kapita *adh Berlaku* sebesar 1.801,2 ribu

rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 2.288,0 ribu rupiah (2009); 2.462,2 ribu rupiah (2010); 2.764,6 ribu rupiah (2011); 2.987,8 ribu rupiah (2012) dan mencapai 3.324,7 ribu rupiah pada tahun 2013.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2000) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, dengan masing-masing senilai 731,5 ribu rupiah (2008); 833,5 ribu rupiah (2009); 823,7 ribu rupiah (2010); 838,0 ribu rupiah (2011); 836,9 ribu rupiah (2012) dan 865,7 ribu rupiah (2013). Peningkatan konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,75 persen (2008) dan meningkat menjadi 13,94 persen (2009). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita yaitu minus 1,17 persen (2010); 1,74 persen (2011); minus 0,14 persen (2012) dan 3,44 persen (2013).

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2008 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 102.089,1 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya masing-masing 118.825,0 ribu rupiah (2009); 127.723,0 ribu rupiah (2010); 146.363,4 ribu rupiah (2011); 164.116,5 ribu rupiah (2012) dan 189.612,6 ribu rupiah (2013). Pada tingkat harga konstan 2000 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2008 dan 2013, masing-masing sebesar 9,99 persen dan 7,40 persen.

**Tabel 9. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Indonesia
Tahun 2008 - 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja)						
Pemerintah ¹³						
a. Barang (<i>Miliar Rp</i>)	205.402,2	269.488,4	281.704,7	305.920,8	324.450,2	374.528,4
(%)	(49,27)	(50,13)	(47,97)	(45,73)	(44,25)	(45,27)
b. Pegawai & Penyusutan (<i>Miliar Rp</i>)	257.547,6	318.580,9	359.840,9	433.370,8	486.315,1	541.191,3
(%)	(61,78)	(59,26)	(61,27)	(64,78)	(66,32)	(65,42)
c. Penerimaan brg jasa (<i>min</i>) (<i>Mil Rp</i>)	46.083,2	50.480,5	54.262,7	70.291,1	77.496,0	88.477,0
(%)	(-11,05)	(9,39)	(9,24)	(10,51)	(10,57)	(10,70)
Total Konsumsi (<i>Miliar Rp</i>)	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Perkembangan (ADHB) ¹⁴ (%)						
a. Barang	452,98	594,32	621,26	674,66	715,53	825,97
b. Pegawai & penyusutan	370,78	458,65	518,05	623,91	700,13	779,14
c. Penerimaan barang & jasa	191,82	210,12	225,86	292,58	322,57	368,27
Total Konsumsi	459,21	592,19	646,93	736,95	807,75	911,26
Pertumbuhan riil (ADHK) (%)						
a. Barang	22,60	21,04	-2,94	3,77	0,97	7,68
b. Pegawai & penyusutan	4,46	5,10	4,65	5,39	1,82	1,45
c. Penerimaan barang & jasa	55,94	-2,25	-1,14	18,06	1,99	5,67
Total Konsumsi	10,43	15,67	0,32	3,22	1,28	4,87
Pertumbuhan indeks harga (%)						
implisit ¹⁵						
a. Barang	11,52	8,39	7,70	4,65	5,03	7,20
b. Pegawai & penyusutan	20,07	17,69	7,94	14,27	10,21	9,70
c. Penerimaan barang & jasa	14,45	12,06	8,73	9,72	8,10	8,04
Total Konsumsi	14,48	11,48	8,89	10,36	8,22	7,57

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2000), diikuti juga jumlah pegawai pemerintah yang mengalami peningkatan. Pada periode tahun 2008 s.d 2013 jumlah pegawai pemerintah terus mengalami peningkatan dengan posisi pada masing-masing tahun sebesar

¹³ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹⁴ Perbandingan terhadap tahun dasar (2000)

¹⁵ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

4.083.360 orang (2008), 4.524.205 orang (2009), 4.598.100 orang (2010) dan 4.570.818 Orang (2011). Namun pada tahun 2012 dan 2013 jumlah pegawai mengalami penurunan yaitu 4.467.982 orang (2012) dan 4.362.805 orang (2013). Dalam kurun waktu tersebut, secara total terjadi penambahan jumlah pegawai pemerintah sebanyak 279.445 orang atau naik sebesar 6,84 persen dari tahun 2008. Kenaikan tersebut di antaranya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai pada banyak unit pemerintah.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2009, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 10,43 persen dan 15,67 persen; untuk konsumsi per-kapita 8,75 persen dan 13,94 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan 2013 yaitu 9,99 persen dan 7,40 persen.

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk belanja pegawai, yang di dalamnya termasuk pengeluaran untuk penyusutan (depresiasi atas barang modal pemerintah). Sekitar 60 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja rutin tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari sebesar 257.547,6 miliar rupiah (2008) menjadi 318.580,9 miliar rupiah (2009), 359.840,9 miliar rupiah (2010), 433.370,8 miliar rupiah (2011), 486.315,1 miliar rupiah (2012) dan 541.191,3 miliar rupiah (2013). Demikian pula dengan proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah. Pada tahun 2008 proporsinya mencapai 61,78 persen dan pada tahun 2009 turun menjadi 59,26 persen. Pada tahun 2010 menjadi 61,27 persen dan meningkat di tahun 2011 menjadi 64,78 persen dan 66,32 persen pada tahun

2012 sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 65,42 persen.

Belanja barang pemerintah secara nominal mengalami peningkatan, dari 205.402,2 miliar rupiah pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 269.488,4 miliar rupiah tahun 2009, 281.704,7 miliar rupiah tahun 2010, 305.920,8 miliar rupiah pada tahun 2011, 324.450,2 miliar rupiah pada tahun 2012 dan 374.528,4 miliar rupiah pada tahun 2013. Secara umum, proporsi belanja barang pada periode 2008-2009 cenderung meningkat. Pada tahun 2008 proporsi belanja barang mencapai 49,27 persen, kemudian meningkat sebesar 50,13 persen pada tahun 2009. Namun pada periode tahun 2010-2013, proporsi belanja barang menurun menjadi 47,97 persen pada tahun 2010, 45,73 persen pada tahun 2011, 44,25 persen pada tahun 2012 dan 45,27 persen pada tahun 2013.

Hal lain yang patut dicermati adalah rasio, yaitu perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan secara gradual dari yang sebesar 4.083,4 ribu orang (2008) menjadi 4.524,2 ribu orang (2009), 4.598,1 ribu orang (2010), 4.571 ribu orang (2011), 4.468 ribu orang (2012) dan 4.362,8 ribu orang (2013). Begitu juga jumlah penduduk meningkat dari sejumlah 231.445 ribu orang pada tahun 2008 menjadi 248.818 ribu orang pada tahun 2013. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut cenderung menurun dengan masing-masing adalah 56,68 (2008), 51,93 (2009), 51,87 (2010), 52,94 (2011), 54,93 (2012) dan 57,03 (2013). Artinya jika pada tahun 2008 setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 57 penduduk maka pada tahun 2009 menjadi sekitar 52 penduduk. Dan begitu pula pada tahun berikutnya satu pegawai pemerintah melayani sekitar 52 penduduk pada tahun 2010, 53 penduduk pada tahun 2011, 55 penduduk pada tahun 2012 dan 57 penduduk pada tahun 2013.

3.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDB menurut penggunaan, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital)¹⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2008 - 2013 menurun dari 11,89 persen (2008) menjadi 4,71 persen (2013). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Bangunan/konstruksi, baik dalam bentuk bangunan tempat tinggal (*residential building*) maupun bangunan bukan tempat tinggal (*non-residential building*) merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan komponen PMTB lainnya.

Proporsi terbesar ke dua setelah bangunan adalah investasi pada kelompok mesin dan perlengkapannya, khususnya untuk produk yang berasal dari impor. Proporsi kelompok barang modal tersebut terhadap total PMTB sebesar 9,70 persen (2008), 7,42 persen (2009), 7,68 persen (2010), 8,49 persen (2011), 9,11 persen (2012) dan 8,91 persen (2013). Barang modal dalam bentuk mesin dan perlengkapan cenderung menurun khususnya pada penggunaan produk domestik atau dalam negeri, dari yang sekitar 1,49

¹⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

persen pada tahun 2008 bergeser menjadi 0,97 persen pada tahun 2013. Mulai tahun 2008 pertumbuhan kelompok barang modal mesin dan perlengkapan dalam negeri mencapai 0,19 persen. Namun pada tahun 2009 pertumbuhan menurun menjadi sebesar minus 0,83 persen dan kembali mengalami pertumbuhan membaik pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,49 persen. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 pertumbuhan kelompok barang modal mesin dan perlengkapan dalam negeri masih tumbuh positif masing-masing yaitu 0,31 persen (2011), 3,37 persen (2012) dan 4,71 persen (2013). Barang modal yang berasal dari impor mengalami pertumbuhan pada tahun 2008 mencapai 31,64 persen dan menurun tajam hingga tumbuh minus 10,80 persen pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010 sampai dengan 2012 pertumbuhan kelompok barang modal yang berasal dari impor tumbuh membaik hingga mencapai 19,60 persen (2010), 21,37 persen (2011) dan 14,16 persen (2012). Pada tahun 2013 pertumbuhan kelompok barang modal yang berasal impor kembali mengalami penurunan yaitu tumbuh minus 0,38 persen.

Alat angkutan mempunyai proporsi yang relatif stabil, yakni sekitar 3 persen dari total barang modal. Dilihat dari rinciannya, pangsa alat angkutan impor sebesar 3,17 persen pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 2,76 persen pada tahun 2009, pada tahun 2010 kembali turun menjadi 2,44 persen, 2,55 persen pada tahun 2011, 2,93 persen pada tahun 2012 dan 2,50 persen pada tahun 2013. Sementara alat angkutan yang berasal dari produksi dalam negeri cenderung stabil dalam kurun waktu tahun 2008-2013 yaitu masing-masing 0,81 persen (2008); 0,69 persen (2009); 0,69 persen (2010); 0,64 persen (2011); 0,72 persen (2012) dan 0,78 persen (2013). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing kelompok barang modal. Pertumbuhan “riil” alat angkutan dalam negeri sebesar 11,32 persen pada tahun 2008 dan mengalami penurunan cukup drastis yaitu menjadi minus

0,74 persen, meskipun pada tahun 2010 kembali pulih hingga mencapai pertumbuhan sebesar 12,41 persen. Pada tahun 2011 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 1,96 persen, dan meningkat di tahun 2012 yaitu sebesar 21,57 persen dan 12,96 di tahun 2013. Sementara alat angkutan yang berasal dari luar negeri memiliki pertumbuhan yang sangat berfluktuasi, dari 41,28 persen di tahun 2008 menjadi minus 10,13 persen pada tahun 2013.

Investasi pada kelompok barang modal lainnya, proporsi barang modal yang berasal dari dalam negeri lebih besar dari barang impor. Proporsi barang modal lainnya dalam negeri menurun setiap tahunnya (dari 1,73 persen di tahun 2008 menjadi 1,45 persen di tahun 2013); begitupun pangsa barang modal lainnya dari impor yang proporsinya menurun dari 0,92 persen di tahun 2008 menjadi 0,73 persen di tahun 2013. Sementara jika dilihat pertumbuhannya, barang modal lainnya ini menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2008 s.d 2013 pertumbuhan kelompok barang modal dalam negeri cenderung meningkat namun pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan minus hingga mencapai minus 4,15 persen. Akan tetapi pada tahun 2011 dan 2013 mulai membaik yaitu sebesar 2,83 persen, 5,91 persen dan 16,02 persen. Sedangkan barang modal luar negeri mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 28,02 persen tahun 2008 menurun menjadi minus 11,50 persen (2009). Kemudian kembali tumbuh positif sebesar 14,30 persen (2010), 4,89 persen (2011), 19,63 persen (2012) dan 4,96 persen (2013).

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2008-2013 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yang mencapai besaran angka 11,89 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu hanya sebesar 3,29 persen. Sedangkan pertumbuhan PMTB pada tahun 2010 sampai dengan 2013 masing-masing adalah 8,48 persen, 8,34 persen, 9,69 persen dan 4,71

persen.

**Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Indonesia Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total PMTB						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,1	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	493.822,3	510.085,9	553.347,7	599.505,5	657.589,1	688.559,8
Proporsi terhadap PDB						
(% - ADHB)	27,70	31,11	32,03	31,95	32,67	31,66
Struktur PMTB ¹⁷						
a. Bangunan/Konstruksi (<i>Miliar Rp</i>)	1.126.443,9	1.490.053,2	1.773.730,9	2.022.427,7	2.267.023,7	2.434.968,6
(%)	(82,18)	(85,42)	(85,90)	(85,32)	(84,31)	(84,66)
b. Mesin & perlengk. (<i>Mil Rp</i>)						
- Dalam Negeri (<i>Mil Rp</i>)	20.455,4	22.435,1	24.015,9	24.296,9	25.657,6	27.772,8
(%)	(1,49)	(1,29)	(1,16)	(1,03)	(0,95)	(0,97)
- Luar Negeri (<i>Mil Rp</i>)	132.991,9	129.426,2	158.666,6	201.285,6	244.860,2	256.169,5
(%)	(9,70)	(7,42)	(7,68)	(8,49)	(9,11)	(8,91)
c. Alat Angkutan						
- Dalam Negeri (<i>Mil Rp</i>)	11.063,1	12.084,0	14.199,5	15.210,3	19.366,1	22.491,1
(%)	(0,81)	(0,69)	(0,69)	(0,64)	(0,72)	(0,78)
- Luar Negeri (<i>Mil Rp</i>)	43.464,6	48.105,0	50.387,1	60.460,6	78.808,2	72.023,9
(%)	(3,17)	(2,76)	(2,44)	(2,55)	(2,93)	(2,50)
d. Modal (Kapital) lainnya						
- Dalam Negeri (<i>Mil Rp</i>)	23.743,5	28.777,0	28.700,9	30.577,2	33.790,0	41.797,9
(%)	(1,73)	(1,65)	(1,39)	1,29	(1,26)	(1,45)
- Luar Negeri (<i>Mil Rp</i>)	12.554,6	13.476,6	15.293,3	16.014,6	19.377,7	21.029,4
(%)	(0,92)	(0,77)	(0,74)	0,68	(0,72)	(0,73)
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,2	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ¹⁸ (%)						
a. Bangunan	7,55	7,07	6,95	6,07	7,39	6,57
b. Mesin & perlengkapan						
- Dalam Negeri	0,19	-0,83	5,49	0,31	3,37	4,71
- Luar Negeri	31,64	-10,80	19,60	21,37	14,16	-0,38
c. Alat Angkutan						
- Dalam Negeri	11,32	-0,74	12,41	1,96	21,57	12,96
- Luar Negeri	41,28	-4,81	9,20	16,73	27,81	-10,13
d. Modal (Kapital) lainnya						
- Dalam Negeri	5,80	6,54	-4,15	2,83	5,91	16,02
- Luar Negeri	28,02	-11,50	14,30	4,89	19,63	4,96
Total PMTB	11,89	3,29	8,48	8,34	9,69	4,71

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

¹⁷ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

¹⁸ Diturunkan dari perhitungan PDB (atas dasar harga konstan/ADHK 2000)

3.4. Perubahan Inventori

Perubahan inventori merupakan istilah terbaru yang diperkenalkan di dalam series PDB adh Konstan 2000, sesuai istilah yang terdapat di dalam SNA'93.¹⁹ Dalam series PDB tahun dasar sebelumnya (adh Konstan 1993) istilah ini disebut sebagai "perubahan stok", dan diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDB menurut penggunaan dengan total PDB menurut lapangan usaha. Jika komponen tersebut bertanda "**positif**" berarti nilai PDB menurut lapangan usaha lebih besar dari pada nilai PDB menurut penggunaan. Sebaliknya apabila bertanda "**negatif**" berarti PDB menurut lapangan usaha lebih kecil dari pada nilai PDB menurut penggunaan. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: perubahan inventori dan diskrepansi statistik. Pada series PDB adh Konstan 2000, mengingat data atau informasi tentang inventori ini sudah mulai tersedia dan tertata dengan relatif baik (dalam beberapa waktu terakhir), maka estimasi perubahan inventori mulai dipisahkan dari diskrepansi statistik.

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Khusus di sektor perdagangan, inventori bisa berupa persediaan barang dagangan. Perubahan yang dimaksud, bisa dalam bentuk penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif). Barang persediaan, bisa berupa produk jadi, produk setengah jadi, bahan baku, bahan penolong maupun barang strategis pemerintah, yang belum terserap oleh pasar. Barang inventori di antaranya meliputi karet kering, biji sawit, coklat, kopi, teh, kulit kina, tembakau, rami, minyak mentah, kondensat, gas alam, elpiji, batu bara (andesit dan antrasit), aspal, bauksit, granit, emas dan sebagainya.

¹⁹ *System of National Account 1993 (United Nations)*

Dari sisi penghitungan, maka komponen Perubahan Inventori merupakan satu-satunya komponen yang hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Inventori						
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5.822,3	-7.264,2	18.364,4	70.774,2	170.309,6	179.778,1
b. ADHK 2000 (<i>Miliar Rp</i>)	2.170,4	-2.065,2	-604,4	9.033,5	50.371,4	53.767,6
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	0,12	-0,13	0,28	0,95	2,07	1,98
Struktur Inventori ²⁰						
Total inventori (%)	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- Hasil Perkebunan	-15,33	9,61	2,25	1,55	1,88	11,86
- Hasil Pertambangan	23,83	10,94	1,91	10,63	2,57	-1,23
- Hasil Industri	150,02	135,83	70,06	71,57	95,16	76,03
- Lainnya	-58,52	-56,38	25,78	16,24	0,39	13,34

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Hal pokok yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsi dalam PDB yang mempunyai

²⁰ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2008 perubahan inventori sebesar 5.822,3 miliar rupiah, yang sebagian besar terjadi pada kelompok industri sebanyak 150,02 persen. Sedangkan tahun 2009 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar minus 7.264,4 miliar rupiah, yang sebagian besar juga terjadi pada kelompok industri sebanyak 135,83 persen, tahun 2010 perubahan inventori mengalami penambahan sebesar 18.364,4 miliar rupiah yang sebagian besar terjadi pada kelompok industri yaitu 70,06 persen, tahun 2011 perubahan inventori meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70.774,2 miliar rupiah yang sebagian besar terjadi pada kelompok industri yaitu 71,57 persen, pada tahun 2012 perubahan inventori meningkat tajam sebesar 170.309,6 miliar rupiah yang sebagian besar juga terjadi pada kelompok industri yaitu 95,16 persen dan pada tahun 2013 perubahan inventori sebesar 179.778,1 miliar rupiah yang sebagian besar juga terjadi pada kelompok industri yaitu 76,03 persen.

3.5. Ekspor

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, karena dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekspor mencakup pembelian barang dan jasa oleh penduduk negara lain/luar negeri (non residen) atas produk ekonomi domestik, yang secara umum mencakup perdagangan barang, angkutan dan komunikasi, serta asuransi. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 12. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Tahun 2008 - 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Ekspor						
a. ADHB (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	1.032.277,8	932.248,6	1.074.568,7	1.221.229,0	1.245.702,0	1.311.759,6
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)						
	29,81	24,16	24,62	26,36	24,29	23,74
Struktur Ekspor ²¹						
a. Barang (Mil Rp)	1.346.960,9	1.227.221,9	1.447.923,9	1.800.027,8	1.819.787,3	1.935.621,2
(%)	(91,31)	(90,61)	(91,37)	(92,03)	(91,02)	(89,74)
b. Jasa (Mil Rp)	128.158,2	127.187,4	136.749,9	155.793,2	179.466,7	221.187,4
(%)	(8,69)	(9,39)	(8,63)	(7,98)	(8,98)	(10,26)
Total ekspor (%)	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²²						
- Barang	8,70	-10,55	15,57	13,99	1,72	4,93
- Jasa	17,50	-2,07	12,78	10,86	4,38	8,35
Total ekspor	9,53	-9,69	15,27	13,65	2,00	5,30

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Secara total, nilai ekspor tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2009 ekspor sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2008, nilai ekspor mencapai 1.475.119,1 miliar rupiah kemudian tahun 2009 mengalami penurunan menjadi sebesar 1.354.409,4 miliar rupiah dan meningkat kembali di tahun 2010 sebesar 1.584.673,8 miliar rupiah. Pada tahun 2011, nilai ekspor meningkat cukup tajam yaitu sebesar 1.955.821,0 miliar rupiah, 1.999.254,0 miliar rupiah pada tahun 2012 dan 2.156.808,6 miliar rupiah pada tahun 2013. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2000 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 1.032.277,8 miliar rupiah (2008); 932.248,6 miliar rupiah (2009); 1.074.568,7 miliar rupiah (2010);

21 Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

22 Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2000)

1.221.229,0 miliar rupiah (2011); 1.245.702,0 miliar rupiah (2012) dan 1.311.759,6 miliar rupiah (2013). Pada periode 2008 s.d 2013, meskipun secara nominal nilai ekspor mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya proporsi dalam PDB justru cenderung menurun dari 29,81 persen pada tahun 2008 menjadi 23,74 persen di tahun 2013.

Menurut komposisi ekspor dalam bentuk barang atau jasa, maka sebagian besar ekspor Indonesia berupa barang (rata-rata 90 persen), sementara nilai ekspor dalam bentuk jasa memiliki peran yang tidak terlalu besar, dengan proporsi di masing-masing tahun sebesar 8,69 persen (2008); 9,39 persen (2009); 8,63 persen (2010); 7,98 persen (2011); 8,98 persen (2012) dan 10,26 persen (2013).

Pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2010 dan 2011, dengan masing-masing tahun mencapai 15,27 persen dan 13,65 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu, pertumbuhan minus terjadi pada tahun 2009 ketika pertumbuhan total ekspor mengalami penurunan sebesar minus 9,69 persen dari tahun 2008 yang tumbuh sebesar 9,53 persen. Pertumbuhan minus tersebut didorong dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2009 yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif, yaitu masing-masing minus 10,55 persen (barang) dan minus 2,07 persen (jasa). Hal ini terjadi disebabkan karena adanya penurunan nilai ekspor baik barang maupun jasa pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 ekspor hanya tumbuh sebesar 2,00 persen dan 5,30 persen.

3.6. Impor

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. Oleh karena itu, untuk mengukur potensi dan besaran produk

domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan, yaitu dengan cara mengurangi nilai PDB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Karena impor bukan merupakan produk yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi domestik Indonesia, oleh karenanya impor harus dikeluarkan dari penghitungan PDB. Dengan demikian, maka PDB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Indonesia.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Indonesia terhadap ekonomi atau produk negara lain (*rest of the world*). Selain dibedakan menurut barang dan jasa, pada tingkat yang agak rinci, impor barang dibedakan menurut 3 kategori yaitu : barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Pada komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Indonesia di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Data pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Indonesia pada periode tahun 2008 s.d 2013 cenderung meningkat, (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2000) hanya pada tahun 2009 saja nilai impor mengalami penurunan. Pada tahun 2009 nilai impor mencapai 1.197.092,7 miliar rupiah, menurun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 1.422.902,1 miliar rupiah. Namun pada tahun 2010 nilai impor mengalami peningkatan mencapai 1.476.620,3 miliar rupiah, dan terus meningkat sebesar 1.851.070,4 miliar rupiah pada tahun 2011, 2.127.725,5 miliar rupiah

pada tahun 2012, dan menjadi 2.338.118,6 miliar rupiah pada tahun 2013. Demikian juga dengan proporsinya pada tahun 2009, yang menurun menjadi 21,35 persen dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 28,75 persen, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya proporsinya membaik, yaitu 22,90 persen pada tahun 2010, 24,95 persen pada tahun 2011, 25,86 persen pada tahun 2012, dan 25,74 persen pada tahun 2013.

**Tabel 13. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Tahun 2008 - 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Nilai Impor						
a. ADHB (Miliar Rp)	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	833.342,2	708.528,8	831.418,3	942.297,3	1.005.036,0	1.017.190,8
Proporsi terhadap PDB (% - ADHB)	28,75	21,35	22,90	24,95	25,86	25,74
Struktur Impor ²³						
a. Barang (Mil Rp)	1.162.041,4	935.465,3	1.193.061,8	1.558.464,2	1.802.977,0	1.966.715,1
(%)	81,67	78,14	80,80	84,19	84,74	84,12
b. Jasa (Mil Rp)	260.860,7	261.627,4	283.558,5	292.606,2	324.748,5	371.403,5
(%)	18,33	21,86	19,20	15,81	15,26	15,88
Total impor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ²⁴						
- Barang	10,67	-18,57	18,59	16,33	7,91	1,37
- Jasa	7,56	-1,53	13,49	3,64	2,13	0,58
Total impor	10,00	-14,98	17,34	13,34	6,66	1,21

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Di sisi lain, secara riil nilai impor yang mengalami peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2010 sebesar 17,34 persen, setelah pada tahun 2009 pertumbuhan impor menurun hingga mencapai minus 14,98 persen. Pada tahun 2011, pertumbuhan impor kembali melambat menjadi 13,34 persen dan berlanjut mengalami perlambatan pada tahun 2012 dan 2013 yaitu 6,66 persen dan 1,21 persen. Hal yang sama juga terjadi pada

²³ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHB)

²⁴ Diturunkan dari perhitungan PDB (ADHK 2000)

pertumbuhan impor jasa yang mana pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan terendah yaitu minus 1,53 persen dan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 13,49 persen.

Menurut komposisi impor dalam bentuk barang atau jasa, maka sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi rata-rata sekitar 82,28 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. Impor dalam bentuk barang cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2008 s.d 2013, di mana pada tahun 2008 sebesar 81,67 persen dan pada tahun 2013 sebesar 84,12 persen. Impor jasa mempunyai pola struktur yang agak berbeda dengan impor barang, yaitu cenderung mengalami penurunan di mana pada tahun 2008 porsi impor jasa sebesar 18,33 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 15,88 persen.

BAB IV

BEBERAPA AGREGAT PDB DAN PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2008 - 2013

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDB. Meskipun secara total mempunyai nilai yang sama, namun PDB yang diukur melalui pendekatan lapangan usaha atau penggunaan mempunyai dua dimensi analisis yang berbeda. Secara garis besar, dua dimensi itu paling tidak mampu untuk menggambarkan tentang bagaimana pendapatan diciptakan dan untuk apa pendapatan tersebut digunakan. Dalam publikasi ini, beberapa rasio (perbandingan relatif) juga akan disajikan guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

Dalam menghasilkan berbagai produk barang dan jasa, maka di satu sisi akan menciptakan nilai tambah, sementara di sisi lain nilai tambah tersebut akan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah rumah tangga, LNPR, perusahaan, dan pemerintah. Berdasarkan proses pembentukan dan pemanfaatan nilai tambah ini, dapat dipelajari lebih jauh tentang sumber-sumber pendapatan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diperhitungkan besaran pendapatan potensial yang akan diterima oleh masyarakat atau yang disebut sebagai "**Pendapatan Nasional**".

4.1 PDB (Nominal)

Aggregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang

dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, maka nilai tambah yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi atas) faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDB di sini. Di sisi yang lain, PDB menurut penggunaan atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi.

Dari series data PDB penggunaan akan diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDB perkapita, yang selama ini digunakan sebagai proksi dari pola dan perkembangan “**distribusi pendapatan**” di dalam masyarakat.

**Tabel 14. Produk Domestik Bruto dan PDB Perkapita
Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai PDB (<i>Miliar Rp</i>)						
- ADHB	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
- ADHK 2000	2.082.456,1	2.178.850,3	2.314.458,8	2.464.566,1	2.618.938,4	2.770.345,1
PDB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)						
- ADHB	21.381,7	23.860,0	27.028,7	30.659,0	33.531,4	36.508,5
- ADHK 2000	8.997,6	9.273,2	9.703,5	10.184,6	10.671,0	11.134,0
Perkembangan						
PDB perkapita ADHB	23,35	11,59	13,28	13,43	9,37	8,88
Pertumbuhan						
PDB perkapita ADHK 2000	4,40	3,06	4,64	4,96	4,78	4,34
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)						
Pertumbuhan	1,54	1,52	1,51	1,46	1,42	1,38

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*

PDB per-kapita Indonesia menunjukkan peningkatan, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk. PDB per-kapita atas dasar harga berlaku (*current condition*), secara kumulatif meningkat mulai tahun 2008, dari sebesar 21.381,7 ribu rupiah di tahun 2008 menjadi 36.508,5 ribu rupiah di tahun 2013. Di mana pada periode tahun 2009 s.d 2012 masing masing tahun meningkat menjadi 23.860,0 ribu rupiah, 27.028,7 ribu rupiah, 30.659,0 ribu rupiah dan 33.531,4 ribu rupiah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDB atau (nilai tambah) sebesar nilai dimaksud pada masing-masing tahun.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4 persen. Pertumbuhan PDB per-kapita ini berawal dengan besaran 4,40 persen (2008) menjadi 3,06 persen (2009), 4,64 persen (2010), 4,96 persen (2011), 4,78 persen (2012) dan 4,34 persen (2013). Di mana pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,47 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut, tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel

Pendapatan Nasional menggambarkan tentang pendapatan potensial yang diterima oleh seluruh masyarakat sesuai sumber-nya, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kenyataannya pendapatan yang dihasilkan di satu wilayah belum tentu sepenuhnya diterima, digunakan atau dinikmati oleh masyarakat yang ada di dalam wilayah tersebut, karena kemungkinan ada sebagian yang mengalir ke luar wilayah/negara. Sebaliknya, ada pula pendapatan yang masuk ke wilayah tersebut dari wilayah lain. Oleh karena itu konsep “**Pendapatan Nasional**” menjelaskan tentang pendapatan yang diterima oleh masyarakat (residen) dari seluruh balas jasa faktor

produksi yang diterima, baik yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik maupun dari luar negeri dikurangi oleh pembayaran atas pendapatan masyarakat non residen..

“Pendapatan Nasional” yang merupakan refleksi ukuran kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat, menggambarkan berbagai hal yang dicapai secara nasional yang dinyatakan dalam satuan moneter, pada kurun waktu tertentu (*current condition*). Ukuran keberhasilan tersebut digambarkan melalui kemampuan dalam menghasilkan berbagai produk atau barang dan jasa, menciptakan pendapatan, mengkonsumsi, serta menambah aset yang dimiliki oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu. Karena sistem ekonomi negara bersifat terbuka, maka terjadi interaksi dan transaksi dengan luar negeri, yang menyebabkan terjadi aliran pendapatan masuk maupun keluar (*factorial income, net*).

“Pendapatan Nasional” diperoleh dari PDB ditambah dengan selisih antara pendapatan faktor produksi yang diterima dari dan yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan faktor produksi ini merupakan perolehan pendapatan atau pembayaran yang diwujudkan dalam bentuk balas jasa faktor produksi tenaga kerja (seperti upah dan gaji) dan bukan tenaga kerja (bunga, deviden, royalti, serta kompensasi atas pemilikan faktor produksi lainnya). Pendapatan tersebut merupakan sumber pembiayaan hidup (konsumsi) masyarakat. Apabila produk ekonomi yang dihasilkan tersebut dikaitkan dengan pola dan perilaku konsumsi masyarakat, maka angka pendapatan nasional dapat digunakan sebagai proksi atas ukuran kemakmuran.

Langkah menghitung Pendapatan Nasional²⁶ adalah dengan mengurangkan PDB (nilai tambah bruto)²⁷ dengan penyusutan dan pajak tidak langsung (neto). Nilai PDB dikurangi penyusutan disebut sebagai PDN (Produk Domestik Neto), kemudian apabila dikurangi dengan pajak tidak langsung (neto) disebut sebagai PDB atas dasar biaya faktor (*at factor cost*). Dengan demikian maka Produk Domestik Neto (PDN) atas dasar

26 Mengacu pada konsep SNA

27 Atas dasar harga pasar

biaya faktor ini identik dengan balas jasa faktor produksi yang diciptakan di dalam wilayah ekonomi domestik (pendapatan domestik). Parameter itu bila diperhitungkan dengan pendapatan faktor yang diterima, dan dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri akan sama dengan **Pendapatan Nasional**.

Dalam kenyataan, Pendapatan Nasional belum bisa menggambarkan pendapatan potensial yang dapat diterima oleh masyarakat, masih ada penggunaan lain yang harus diperhitungkan, yaitu transfer berjalan (*current transfer*). Pendapatan Nasional ditambah dengan transfer berjalan (neto) akan sama dengan "**Pendapatan Disposabel**" (*disposable income*). Untuk itu, Pendapatan Disposabel menggambarkan maksimum pendapatan yang tersedia, yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membiayai konsumsi, atau untuk meningkatkan kekayaannya.

Dilihat secara umum, selama ini pendapatan nasional nilainya selalu lebih kecil dari nilai nominal PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena dideduksi oleh pajak tidak langsung (neto) dan penyusutan, pendapatan faktor produksi yang diterima dari luar negeri jauh lebih kecil dari pada yang dibayarkan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi domestik. Mengalirnya pendapatan faktor produksi ke luar negeri disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh negara lain. Namun apabila diperhitungkan transfer maka penerimaan transfer Indonesia selalu dalam kondisi "positif", dalam arti transfer yang diterima dari luar negeri lebih tinggi dari pada yang dibayarkan ke luar negeri. Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel ini merupakan ukuran yang bersifat universal, dan digunakan sebagai indikator perbandingan kemakmuran antar negara.

PDB adh Berlaku menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, diawali dengan nilai sebesar 4.948.688,4 miliar rupiah (2008) menjadi 5.606.203,4 miliar rupiah (2009),

6.446.851,9 miliar rupiah (2010), 7.419.187,1 miliar rupiah (2011), 8.229.439,4 miliar rupiah (2012) dan mencapai 9.083.972,3 miliar rupiah pada tahun 2013.

**Tabel 15. PDB, Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Nasional
Perkapita Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
<i>Minus :</i>						
Penyusutan	247.434,4	280.310,2	322.342,6	370.959,4	411.472,0	454.198,6
<i>Minus :</i>						
Pajak tdk langsung (<i>neto</i>) ²⁸	104.045,1	214.833,2	225.193,5	179.725,3	46.436,5	271.111,7
<i>Plus :</i>						
Pendapatan atas faktor produksi dari LN (<i>neto</i>) ²⁹	-175.865,2	-196.219,5	-180.968,9	-216.892,7	-243.193,0	-281.096,8
Pendapatan Nasional (Miliar Rp)	4.421.343,7	4.914.840,5	5.718.346,9	6.651.609,7	7.528.338,0	8.077.565,2
<i>Plus</i>						
Penerimaan Transfer ³⁰ dari LN (<i>neto</i>) ³¹	51.199,6	46.590,1	41.660,1	36.623,5	38.311,4	42.308,9
Pendapatan Disposabel Nasional (Miliar Rp)	4.472.543,3	4.961.430,6	5.760.007,0	6.688.233,2	7.566.649,4	8.119.874,2
<i>Perkapita (ribu rupiah)</i>						
- PDB	21.381,7	23.860,0	27.028,7	30.659,0	33.531,4	36.508,5
- Pendapatan Nasional	19.103,2	20.917,5	23.974,4	27.487,0	30.674,7	32.463,7
- Pendapatan Disposabel	19.324,5	21.115,8	24.149,0	27.638,4	30.830,8	32.633,8
- Kurs 1 US \$ = Rp	9.545,0	10.176,9	8.997,9	8.697,1	9.357,9	10.431,2
<i>Perkapita (US \$)</i>						
- PDB	2.240,1	2.344,5	3.003,9	3.525,2	3.583,2	3.499,2
- Pendapatan Nasional	2.001,4	2.055,4	2.664,5	3.160,5	3.277,9	3.112,2
- Pendapatan Disposabel	2.024,6	2.074,9	2.683,9	3.177,9	3.294,6	3.128,5
Jumlah penduduk (000 org) ³²	231.445	234.963	238.519	241.991	245.425	248.818

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Nilai penyusutan juga cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembentukan modal pada berbagai lapangan usaha, masing-masing dengan nilai 247.434,4 miliar rupiah (2008), 280.310,2 miliar rupiah (2009), 322.342,6 miliar rupiah (2010), 370.959,4 miliar rupiah (2011), 411.472,0 miliar rupiah (2012) dan pada tahun 2013

28 Pajak tidak langsung minus subsidi

29 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

30 Transfer berjalan (current transfer)

31 Yang diterima dikurangi yang dibayarkan

32 Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2000 - 2025 (Edisi Revisi)

mencapai 454.198,6 miliar rupiah. Sementara pajak tidak langsung neto atau pajak yang dibayar dikurangi subsidi yang diterima oleh masyarakat dalam beberapa tahun meningkat. Pada tahun 2008 pajak tidak langsung neto sebesar 104.045,1 miliar rupiah meningkat di tahun 2009 menjadi 214.833,2 miliar rupiah dan 225.193,5 miliar rupiah di tahun 2010. Pada tahun 2011 dan 2012 pajak tak langsung neto mengalami penurunan yaitu menjadi 179.725,3 miliar rupiah dan 46.436,5 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat kembali menjadi 271.111,7 miliar rupiah dari tahun sebelumnya.

Nilai "**Pendapatan Nasional**" pada masing-masing tahun sebesar 4.421.343,7 miliar rupiah pada tahun 2008, 4.914.840,5 miliar rupiah pada tahun 2009, 5.718.346,9 miliar rupiah pada tahun 2010, 6.651.609,7 miliar rupiah pada tahun 2011, 7.528.338,0 miliar rupiah pada tahun 2012 dan mencapai 8.077.565,2 miliar rupiah pada tahun 2013. Pendapatan nasional itu, apabila dikoreksi dengan penerimaan transfer dari luar negeri akan diperoleh Pendapatan Disposabel Nasional. Karena transfer yang diterima dari luar negeri selalu lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (dengan posisi selalu positif atau bertambah), maka menyebabkan adanya aliran devisa masuk dari transaksi tersebut. Penerimaan transfer dari luar negeri pada tahun 2008 sebesar 51.199,6 miliar rupiah menurun menjadi 46.590,1 miliar rupiah pada tahun 2009, 41.660,1 miliar rupiah pada tahun 2010 dan 36.623,5 miliar rupiah pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 penerimaan transfer dari luar negeri mengalami peningkatan menjadi 38.311,4 miliar rupiah dan di tahun 2013 menjadi 42.308,9 miliar rupiah.

Pendapatan Disposabel (Nasional) yang secara umum nilainya di atas Pendapatan Nasional, juga cenderung semakin meningkat dengan besaran masing-masing tahun adalah 4.472.543,3 miliar rupiah pada tahun 2008, 4.961.430,6 miliar rupiah pada tahun 2009, 5.760.007,0 miliar rupiah pada tahun 2010, 6.688.233,2 miliar rupiah pada tahun 2011, 7.566.649,4 miliar rupiah pada tahun 2012 dan 8.119.874,2 miliar rupiah pada tahun

2013. Ukuran per-kapita, baik yang menyangkut PDB per-kapita, Pendapatan Nasional per-kapita serta Pendapatan Disposabel per-kapita yang dinyatakan dalam satu satuan rupiah menunjukkan peningkatan. Dalam rupiah, perkembangan rata-rata PDB per-kapita, Pendapatan Nasional per-kapita serta Pendapatan Disposabel per-kapita setiap tahun juga menunjukkan peningkatan secara optimal. Dilihat dari titik penghujung tahun (2008 dan 2013), PDB per-kapita meningkat dari sebesar 21.381,7 ribu rupiah (2008) menjadi 36.508,5 ribu rupiah (2013). Kemudian Pendapatan Nasional per-kapita dari sebesar 19.103,2 ribu rupiah (2008) meningkat menjadi sebesar 32.463,7 ribu rupiah (2013). Sedangkan pendapatan disposabel per-kapita juga meningkat dari 19.324,5 ribu rupiah (2008) menjadi 32.633,8 ribu rupiah (2013).

Rata-rata perkapita dalam US\$ juga meningkat, PDB per-kapita dari 2.240,1 US\$ pada tahun 2008 menjadi 3.499,9 US\$ pada tahun 2013, pendapatan nasional per-kapita dari 2.001,4 US\$ pada tahun 2008 menjadi 3.112,2 US\$ tahun 2013 dan pendapatan disposabel dari 2.024,6 US\$ pada tahun 2008 menjadi 3.128,5 US\$ di tahun 2013.

4.3. Kecenderungan Rata-rata untuk Mengkonsumsi dan Menabung / *Average Propensity to Consume & Average Propensity to Save*

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satu satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \quad APC = \frac{C}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel.

Perlu diketahui pula bahwa $APC + APS = 1$

**Tabel 16. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan Disposabel						
Nasional (Y_d) (Miliar Rp)	4.472.543,3	4.961.430,6	5.760.007,0	6.688.233,2	7.566.649,4	8.115.521,0
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) (Miliar Rp)	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	3.416.823,6	3.828.584,7	4.230.707,9	4.722.364,2	5.229.642,8	5.898.337,2
APC	0,76	0,77	0,73	0,71	0,69	0,73
Tabungan (Miliar Rp)	1.055.719,7	1.132.845,9	1.529.299,1	1.965.869,0	2.337.006,6	2.221.537,1
APS	0,24	0,23	0,27	0,29	0,31	0,27

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

4.4. Perbandingan Penggunaan PDB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDB Indonesia (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Indonesia sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

**Tabel 17. Perbandingan PDB Penggunaan untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
Total Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	2,03	2,43	2,30	2,07	2,25	2,35

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 2,03 kali dari yang diekspor di tahun 2008, di tahun-tahun berikutnya rasio masing-masing sebesar 2,43 kali pada tahun 2009; 2,30 kali pada tahun 2010; 2,07 kali pada tahun 2011, 2,25 kali pada tahun 2012 dan 2,35 kali pada tahun 2013. Bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga, peningkatan rasio yang relatif tajam pada tahun 2009 (2,43) lebih disebabkan karena penurunan nilai ekspor, sementara sebaliknya konsumsi rumah tangga justru meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan atau sebaliknya nilai ekspor semakin menurun. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan yang relatif tajam juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.5 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012 *	2013 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Miliar Rp)	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,1	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,19	1,89	1,76	1,71	1,67	1,76

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 2,19 pada tahun 2008 menjadi 1,89 pada tahun 2009. Pada tahun 2010 rasio mengalami penurunan menjadi 1,76 dan terus turun berturut-turut menjadi 1,71 pada tahun 2011 dan 1,67 pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2013 rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB mengalami peningkatan menjadi 1,76. Itu terjadi karena adanya peningkatan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami perlambatan.

4.6. Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk

menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga (termasuk LNPRT) dan pemerintah, yang meskipun mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDB
Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Konsumsi Akhir (ADHB)						
<i>(Miliar Rp)</i>						
a. Rumah tangga	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
b. Pemerintah	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
J u m l a h	3.416.823,6	3.828.584,7	4.230.707,9	4.722.364,2	5.229.642,8	5.898.337,2
PDB (ADHB)						
<i>(Miliar Rp)</i>						
	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
Proporsi	69,05	68,29	65,62	63,65	63,55	64,93

* sementara ** sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga dan pemerintah (lebih dari 60 persen). Meskipun konsumsi rumah tangga dan pemerintah makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsi terhadap PDB semakin menurun. Berturut-turut 69,05 persen (2008), 68,29 persen (2009), 65,62 persen (2010), 63,65 persen (2011), 63,55 persen (2012) dan 64,93 persen (2013). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.7 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor pasti menggunakan kapital (PMTB), sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa

pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2008 – 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
Total PMTB (ADHB) (Miliar Rp)	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,1	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,08	0,78	0,77	0,83	0,74	0,75

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Pada tahun 2008 ekspor mempunyai nilai lebih tinggi dari PMTB. Namun pada periode tahun 2009 s.d 2013, nilai ekspor lebih rendah dari PMTB sebagaimana digambarkan di atas. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedia sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Besaran rasio masing-masing tahun adalah sebagai berikut: 1,08 (tahun 2008), 0,78 (tahun 2009), 0,77 (tahun 2010), 0,83 (tahun 2011), 0,74 (tahun 2012) dan 0,75 (tahun 2013). Penurunan rasio di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.8. Perbandingan PDB terhadap Impor

Memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Besar kecilnya ketergantungan ditunjukkan melalui rasio, apabila rasionya

kecil berarti ketergantungan semakin tinggi, sebaliknya apabila rasionya besar berarti ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

Tabel 21. Rasio PDB terhadap Impor Tahun 2008 – 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB (ADHB) (Miliar Rp)	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
Total Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
Rasio PDB terhadap Impor	3,48	4,68	4,37	4,01	3,87	3,89

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Rasio PDB terhadap impor tahun 2008 - 2009 menunjukkan peningkatan dari 3,48 di tahun 2008 menjadi 4,68 di tahun 2009, namun kemudian menurun pada tahun berikutnya yaitu menjadi 4,37 di tahun 2010, 4,01 di tahun 2011, 3,87 di tahun 2012 dan 3,89 di tahun 2013. Rasio tertinggi yang terjadi pada tahun 2009 (4,68) lebih disebabkan peningkatan PDB, sedangkan sebaliknya nilai impor justru menurun. Peningkatan rasio menunjukkan berkurangnya ketergantungan PDB terhadap produk impor, terutama karena terjadinya penurunan nilai impor pada tahun 2009.

4.9. Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Berdasarkan seri data yang ada dapat ditunjukkan bahwa selama ini ekonomi Indonesia masih selalu ditopang oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan ini dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*) yang selalu menunjukkan ketidakseimbangan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Tahun 2008 – 2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<u>Total Penyediaan</u>						
PDB (ADHB)	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
(Miliar Rp)	(77,67)	(82,40)	(81,36)	(80,03)	(79,46)	(79,53)
Total nilai Impor ADHB	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
(Miliar Rp)	(22,33)	(17,60)	(18,64)	(19,97)	(20,54)	(20,47)
<u>Total Permintaan Akhir³³</u>						
(Miliar Rp)	6.371.590,5	6.803.296,1	7.923.472,2	9.270.257,5	10.357.164,9	11.422.090,9
	(100,00 %)	(100,00 %)	(100,00%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri, dengan rentang 17 s.d 22 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 80 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat dari 6.371.590,5 miliar (2008) rupiah menjadi 6.803.296,1 miliar rupiah (2009) dan 7.923.472,2 miliar rupiah (2010). Tahun 2011 permintaan akhir masyarakat sudah mencapai nilai sebesar 9.270.257,5 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 10.357.164,9 miliar rupiah dan pada tahun 2013 mencapai 11.422.090,9 miliar rupiah.

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 4.948.688,4 miliar rupiah (2008); 5.606.203,4 miliar rupiah (2009); 6.446.851,9 miliar rupiah (2010); 7.419.187,1 miliar rupiah (2011); 8.229.439,4 miliar rupiah (2012) dan 9.083.972,3 miliar rupiah (2013). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 1.422.902,1

³³ Termasuk diskrepansi statistik

miliar rupiah (2008); 1.197.092,7 miliar rupiah (2009); 1.476.620,3 miliar rupiah (2010); 1.851.070,4 miliar rupiah (2011); 2.127.725,5 miliar rupiah (2012) dan 2.338.118,6 miliar rupiah (2013).

4.10. Neraca Perdagangan (*Trade Balance*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai "**Ekspor Neto**", apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, sebaliknya apabila nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor, maka yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu negara di antaranya juga ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio di sini tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Tahun 2008 – 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
Net ekspor (X - M) (Miliar Rp)	52.217,0	157.316,7	108.053,5	104.750,6	-128.471,5	-181.310,0
Rasio ekspor thdp Impor	1,04	1,13	1,07	1,06	0,94	0,92

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Selama periode 2008 - 2011, posisi perdagangan barang dan jasa dengan luar negeri selalu menunjukkan nilai positif, atau neraca perdagangan barang dan jasa Indonesia selalu dalam posisi surplus. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**tabungan luar negeri**”. Surplus perdagangan Indonesia yang terjadi antara tahun 2008 sampai dengan 2011 tercatat sebesar 52.217,0 miliar rupiah (2008), 157.316,7 miliar rupiah (2009), 108.053,5 miliar rupiah (2010) dan 104.750,6 miliar rupiah (2011). Namun pada tahun 2012 dan 2013 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 128.471,5 miliar rupiah dan minus 181.310,0 miliar rupiah.

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2008-2011, tahun 2008 sebesar 1,04 menjadi sekitar 1,13 pada tahun 2009, kemudian 1,07 pada tahun 2010 dan 1,06 pada tahun 2011. Namun rasio ekspor terhadap impor berbalik arah pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 0,94 dan 0,92.

4.11. Rasio Perdagangan Internasional (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional, apakah didominasi oleh ekspor atau impor. Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor dikurangi impor dibagi dengan jumlah ekspor dan impor. Koefisien RPI berkisar antara -1 s.d +1 ($-1 < RPI < +1$). Artinya jika RPI berkisar antara minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara positif 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 24. Rasio Perdagangan Internasional Tahun 2008 - 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
+Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
(X - M) (Miliar Rp)	52.217,0	157.316,7	108.053,5	104.750,6	-128.471,5	-181.310,0
(X + M) (Miliar Rp)	2.898.021,2	2.551.502,1	3.061.294,1	3.806.891,4	4.126.979,5	4.494.927,3
R P I	0,02	0,06	0,04	0,03	-0,03	-0,04

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2008-2011, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor, namun pada tahun 2012 dan 2013 posisi ekspor lebih rendah dari impor. Kecenderungan nilai ekspor pada periode tersebut terus meningkat dari 1.475.119,1 miliar rupiah pada tahun 2008 menjadi 2.156.808,6 miliar rupiah pada tahun 2013. Begitu pula dengan kecenderungan impor, yang mempunyai pola hampir sama dengan ekspor, cenderung meningkat setiap tahun.

Rasio Perdagangan Internasional Indonesia pada periode 2008-2011 mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Indonesia selalu didominasi oleh kegiatan ekspor, meskipun dengan rasio yang cukup kecil yaitu kurang dari 0,1, sedangkan pada tahun

2012-2013 rasio perdagangan internasional Indonesia didominasi oleh impor karena rasio yang menunjukkan tanda minus.

4.12. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri

Nilai tukar perdagangan luar negeri (*Term of Trade*) sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga barang ekspor maupun harga barang impor. Ada dua parameter yang dibahas yaitu Indeks Nilai Tukar (I_{NT}) dan Kapasitas Impor (K_M) yang masing-masing menjelaskan tentang daya beli dan kemampuan mengimpor berdasarkan nilai ekspor. Indeks nilai tukar diperoleh dengan cara membagi indeks implisit (harga) ekspor (II_x) dengan indeks implisit (harga) impor (II_M). Sedangkan K_M diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor adh Berlaku dengan indeks implisit impor, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 25. Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri Tahun 2008 – 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nilai Ekspor (ADHB) (Miliar Rp)	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
Nilai Impor (ADHB) (Miliar Rp)	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
Indeks Implisit Ekspor	142,90	145,28	147,47	160,15	160,49	164,42
Indeks Implisit Impor	170,75	168,95	177,60	196,44	211,71	229,86
Indeks nilai tukar (I_{NT})	83,69	85,99	83,03	81,53	75,81	71,53
Kapasitas Impor	863.923,8	801.640,6	892.258,4	995.621,2	944.352,2	938.312,5

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Kemampuan mengimpor pada tahun 2008 adalah 1.422.902,1 miliar rupiah namun menurun menjadi 1.197.092,7 miliar rupiah pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010-2013 kemampuan impor Indonesia meningkat masing-masing menjadi 1.476.620,3 miliar rupiah, 1.851.070,4 miliar rupiah, 2.127.725,5 miliar rupiah dan 2.338.118,6 miliar rupiah.

4.13. Rasio Pendapatan Nasional (PN) Terhadap PDB

Merupakan perbandingan antara Pendapatan Nasional yang dihasilkan terhadap Nilai Tambah Bruto (PDB pendekatan lapangan usaha) sebagai sumber terciptanya pendapatan bagi masyarakat. Berbagai sektor produksi mengalokasikan balas jasa faktor produksi pada pemilik faktor produksi yang sebagian besar dimiliki oleh rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran pendapatan yang secara potensial akan diterima masyarakat, maka unsur yang bukan merupakan faktor pendapatan harus dikeluarkan dari penghitungan, seperti penyusutan dan pajak tidak langsung (neto), yang hasilnya kemudian disebut sebagai pendapatan domestik. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional, maka pendapatan domestik tersebut harus ditambah dengan pendapatan faktor yang masuk setelah dikurangi dengan pendapatan faktor yang keluar. Sementara itu untuk mendapatkan pendapatan yang benar-benar diterima (atau siap dibelanjakan) maka pendapatan nasional tersebut harus ditambah dengan penerimaan transfer setelah dikurangi pembayaran transfer (khusus untuk transfer berjalan).

**Tabel 26. Rasio Pendapatan Nasional dan Pendapatan Disposabel Terhadap PDB
Tahun 2008 - 2013**

U r a i a n	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
Pendapatan Nasional (PN)	4.421.343,7	4.914.840,5	5.718.346,9	6.651.609,7	7.528.338,0	8.077.565,2
Rasio PN/PDB	89,34	87,67	88,70	89,65	91,48	88,92
Pendapatan Disposabel (PD)	4.472.543,3	4.961.430,6	5.760.007,0	6.688.233,2	7.566.649,4	8.119.874,2
Rasio PD/PDB	90,38	88,50	89,35	90,15	91,95	89,39

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data selanjutnya menunjukkan bahwa dari nilai tambah yang dihasilkan setiap tahun ada sebagian yang tidak diterima oleh masyarakat. Sebagian pendapatan faktor

produksi lebih banyak yang dibayarkan ke luar negeri dari pada yang diterima dari luar negeri (posisi defisit). Sementara, penerimaan transfer dari luar negeri lebih besar dari transfer yang dibayarkan ke luar negeri (posisi surplus), sehingga menyebabkan adanya penambahan pendapatan masyarakat di wilayah domestik.

Pada tahun 2008 dari PDB yang dihasilkan sebesar 4.948.688,4 miliar rupiah ada sebesar 89,34 persen yang menjadi pendapatan nasional dan 90,38 persen yang menjadi pendapatan disposabel. Setelah tahun 2008, pendapatan nasional maupun pendapatan disposabel mengalami peningkatan secara nominal setiap tahunnya, namun persentasenya cenderung stabil setiap tahunnya. Pendapatan Nasional meningkat dari yang sebesar 4.421.343,7 miliar rupiah (2008) menjadi 4.914.840,5 miliar rupiah (2009); 5.718.346,9 miliar rupiah (2010); 6.651.609,7 miliar rupiah (2011); 7.528.338,0 miliar rupiah (2012) dan menjadi 8.077.565,3 miliar rupiah pada tahun 2013.

Sementara itu pendapatan disposabel juga meningkat secara nominal dari 4.472.543,3 miliar rupiah (2008) menjadi 8.119.874,2 miliar rupiah (2013), namun dengan proporsi terhadap PDB yang menurun yaitu masing-masing sebesar 90,38 persen (2008) menjadi 89,39 persen (2013).

4.14. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi

(produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 27. Incremental Capital Output Ratio
Tahun 2008 - 2013

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PDB (ADHK) (miliar rupiah)	2.082.456,1	2.178.850,4	2.314.458,8	2.464.566,1	2.618.938,4	2.770.345,1
Perubahan (miliar rupiah)	118.128,8	96.394,3	135.608,4	150.107,3	154.372,3	151.406,7
PMTB (ADHK 2000) (miliar Rp)	493.822,3	510.085,9	553.347,7	599.505,5	657.589,1	688.559,8
ICOR	4,18	5,29	4,08	3,99	4,26	4,55

Keterangan : * sementara ** sangat sementara

Data di atas menunjukkan besaran ICOR meningkat dari sebesar 4,18 (2008) menjadi 5,29 (2009). Pada tahun 2010 dan 2011 ICOR menurun menjadi 4,08 dan 3,99. ICOR pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 4,26 dan menjadi sebesar 4,55 pada tahun 2013.

BAB V

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

PDB menurut penggunaan (*Use of GDP*) disebut juga sebagai PDB menurut permintaan akhir (*final demand*) atau PDB menurut penggunaan (*GDP expenditure*). Dilihat dari sisi permintaan, PDB merupakan jumlah seluruh nilai permintaan atas produk atau barang dan jasa oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhirnya. Disebut sebagai permintaan akhir karena produk tersebut tidak digunakan untuk tujuan proses lebih lanjut, tetapi habis digunakan baik untuk konsumsi, investasi maupun di ekspor ke negara lain. Barang dan jasa tersebut merupakan produk domestik yang dihasilkan (*output*) di wilayah domestik Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri (*impor*).

Sedangkan jika dilihat dari sisi penggunaan, PDB merupakan jumlah nilai pengeluaran (*expenditure*) seluruh sektor institusi untuk pembelian berbagai barang dan jasa yang berasal dari produksi domestik maupun impor. Sektor institusi yang dimaksud meliputi : sektor rumah tangga (termasuk lembaga nir-laba yang melayani rumah tangga/LNPRT), perusahaan (korporasi), serta pemerintah. Dengan demikian, maka PDB menurut penggunaan menurut pelaku serta aktivitas ekonominya dapat diklasifikasikan dalam empat kelompok utama pengeluaran yaitu konsumsi (akhir) rumah tangga dan LNPRT, konsumsi (akhir) pemerintah, investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto) dan ekspor. Apabila dilihat dari pendekatan ini, maka PDB penggunaan menjelaskan hubungan antara pelaku pengeluaran dengan penggunaan berbagai produk barang dan jasa dari hasil produksi domestik. Termasuk juga dalam komponen ini komponen perubahan inventori, dan perbedaan statistik yang dihitung dari selisih total PDB

sektoral dengan total PDB penggunaan³⁴.

Penghitungan PDB menurut penggunaan disajikan dalam dua bentuk penilaian yaitu atas dasar harga (adh) Berlaku dan adh Konstan 2000. Penghitungan adh Berlaku adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDB penggunaan yang dinilai atas dasar harga pada masing-masing tahun (tahun berjalan). Sedangkan penghitungan adh Konstan 2000 adalah penghitungan terhadap seluruh komponen PDB yang dinilai berdasarkan harga pada tahun dasar (2000). PDB adh Berlaku Indonesia menjelaskan tentang perkembangan nilai (nominal) atas perubahan volume berbagai produk barang dan jasa yang dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan harga produk tersebut. Sedangkan PDB adh Konstan adalah penilaian PDB secara “riil”, yaitu dengan mengalikan volume pada tahun berjalan dengan harga pada satu tahun dasar (2000). Pada kondisi tersebut pengaruh kenaikan harga sudah dihilangkan, sehingga PDB benar-benar hanya menggambarkan perubahan volume (kuantum).

Pada umumnya, penghitungan PDB adh Konstan untuk komponen penggunaan menggunakan metoda “deflasi”, yaitu dengan cara membagi nilai PDB adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai. Belum tersedianya data tentang volume³⁵ konsumsi akhir untuk hampir seluruh komponen PDB, menyebabkan pendekatan tersebut masih digunakan sampai saat ini.

Selain PDB menurut penggunaan, dalam publikasi ini disajikan data agregat lain yang diturunkan dari PDB, seperti “**Pendapatan Nasional**” dan “**Pendapatan Disposabel**”, serta beberapa agregat lain seperti PDB dan Pendapatan perkapita, konsumsi rumah tangga perkapita, konsumsi pemerintah, rasio ekspor terhadap impor, neraca perdagangan. Unsur yang membedakan PDB dengan pendapatan disposabel nasional adalah “Pendapatan Faktor Produksi (neto)” dan “Transfer Berjalan (neto)” yang

³⁴ diperlakukan sebagai komponen residual

³⁵ data volume yang tersedia hanya untuk ekspor dan impor barang

turut memberi kontribusi pada pendapatan masyarakat. Pendapatan faktor produksi neto merupakan selisih antara pendapatan faktorial (faktor produksi) yang diterima dari luar negeri dikurangi dengan yang dibayarkan ke luar negeri.

Dalam PDB masih terdapat penyusutan dan pajak tak langsung (neto) atau yang disebut sebagai nilai tambah bruto adh pasar. Untuk menghitung sumber pendapatan masyarakat yang berasal dari faktor produksi yang dimiliki, maka dua elemen tersebut harus dikeluarkan. Untuk itu, nilai tambah yang akan terbentuk disebut sebagai nilai tambah neto atas dasar biaya faktor, atau secara konsep disebut pula sebagai balas jasa faktor produksi. Pada gilirannya balas jasa tersebut akan menjadi sumber pendapatan masyarakat (di wilayah domestik) yang bila ditambah dengan pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri (neto) dikenal dengan terminologi “Pendapatan Nasional”.

Dengan demikian, angka produk domestik bruto per-kapita, pendapatan nasional per-kapita, pendapatan disposabel per-kapita maupun agregat lain merupakan angka yang diturunkan dari penghitungan PDB berikut dengan komponennya, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2000. Untuk memperoleh angka per-kapita, maka masing masing data agregat tersebut dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun³⁶ yang penyebarannya dianggap mewakili.

5.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) mencakup berbagai pengeluaran oleh sektor rumah tangga (termasuk LNPRT) atas berbagai barang dan jasa, baik yang berasal dari produk domestik maupun impor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam konteks ini, fungsi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final demand*).

³⁶ merupakan jumlah penduduk awal tahun ditambah jumlah penduduk akhir tahun kemudian dibagi dengan dua.

Secara spesifik, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah individu atau sekelompok individu yang ber-tempat tinggal dengan menggunakan akomodasi dan fasilitas yang sama. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki kekayaan, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

a. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga (termasuk LNPRRT) dengan tujuan untuk dikonsumsi selama periode satu tahun. Rumah tangga yang dimaksud adalah rumah tangga yang berada dalam batas wilayah domestik suatu negara/wilayah, baik penduduk negara itu maupun penduduk negara lain yang sudah merupakan residen negara Indonesia. Penduduk negara lain dianggap sebagai residen Indonesia bila mereka telah tinggal di Indonesia lebih dari satu tahun, kecuali mereka yang termasuk sebagai anggota korps diplomatik, staf kedutaan asing (tidak termasuk staf lokal), dan perwakilan negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRRT) adalah lembaga swasta yang didirikan untuk melayani rumah tangga dan aktivitasnya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Secara garis besar, PK-RT terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pengeluaran makanan di antaranya terdiri dari bahan makanan (produk pertanian dan hasil industri pengolahan), minuman, rokok, tembakau dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran bukan makanan di antaranya meliputi pembelian barang tahan lama, pakaian, asesoris, bahan bakar, telepon, transportasi, biaya kesehatan, jasa-jasa lain, barang keperluan pribadi dan berbagai pengeluaran lainnya. Pengeluaran ini merupakan pengeluaran untuk tujuan konsumsi, tidak untuk keperluan usaha rumah tangga. Jika

ada sebagian dari pengeluaran tersebut digunakan untuk keperluan usaha, maka nilai seluruh pengeluaran tersebut harus dikurangi dengan besarnya nilai yang digunakan untuk keperluan usaha tersebut.

Pembelian dan perbaikan besar atas bangunan tempat tinggal (rumah), tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga, tetapi masuk dalam pembentukan modal. Sedangkan pengeluaran atas rumah yang ditempati (baik milik sendiri maupun sewa), seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening air, listrik, dan telepon, termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Untuk memperkirakan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yang berbeda, yaitu “metoda langsung” dan “metoda tidak langsung” atau penilaian harga eceran.

Pada metoda langsung, nilai estimasi pengeluaran konsumsi rumah tangga diperoleh melalui hasil pencatatan pengeluaran rumah tangga. Sumber data yang digunakan adalah SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS. Dari survei tersebut diperoleh data tentang nilai konsumsi per-kapita seminggu untuk kelompok makanan, dan nilai konsumsi per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan. Berdasarkan data SUSENAS dan data jumlah penduduk, dapat diperkirakan nilai pengeluaran rumah tangga selama satu tahun. Nilai estimasi tersebut merupakan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga *adh Berlaku*. Untuk memperoleh estimasi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga *adh Konstan*, maka nilai pengeluaran *adh Berlaku* tersebut di-*deflate* dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Metoda penilaian harga eceran (tak langsung) digunakan untuk melengkapi hasil estimasi dengan metoda langsung. Metoda ini akan dipakai bila informasi yang tersedia

hanya konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum. Nilai konsumsi rumah tangga dapat diperoleh dengan jalan mengalikan kuantum dengan harga eceran setiap jenis barang yang dikonsumsi. Nilai estimasi tersebut merupakan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga *adh Berlaku*. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga *adh Konstan* diperoleh dengan cara “deflasi”, yaitu dengan membagi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga *adh Berlaku* dengan indeks harga yang sesuai atau yang mempunyai korelasi dengan jenis barang konsumsi (dirinci menurut kelompok). Indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen (IHK), yang disusun oleh BPS.

5.2 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran oleh pemerintah atas penggunaan berbagai produk atau barang dan jasa baik yang berasal dari domestik maupun impor, dengan maksud untuk direlokasikan kembali dalam bentuk transfer (hibah) pada masyarakat. Pemerintah merupakan institusi yang juga menghasilkan produk, tetapi pada akhirnya produk ini akan dikonsumsi sendiri oleh pemerintah (*own account consumption*). Sebagian besar produk pemerintah itu berbentuk jasa layanan pada masyarakat.

a. Konsep dan Definisi

Pemerintah dalam konteks PDB penggunaan, berfungsi sebagai konsumen akhir barang dan jasa. Aktivitas pemerintah mencakup penyelenggaraan sistem administrasi negara, yang dilaksanakan melalui kementrian, berbagai lembaga non-kementrian, dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa). Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang (termasuk biaya perjalanan, pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin); tidak termasuk penerimaan dari barang dan jasa yang dihasilkan sendiri.

Transaksi atau jenis pengeluaran pemerintah meliputi :

- i. ***Pengeluaran untuk belanja barang*** ; merupakan pengeluaran untuk pembelian barang tidak tahan lama, dalam arti produk habis dipakai dalam proses produksi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah di dalam maupun di luar negeri. Data diperoleh dari belanja rutin pemerintah ditambah dengan belanja pembangunan yang merupakan bagian dari pengeluaran rutin, seperti halnya pengeluaran pembangunan untuk pertahanan keamanan, proyek pendidikan, dsb.
- ii. ***Pengeluaran untuk belanja pegawai*** ; merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran pegawai pemerintah dalam bentuk upah dan gaji baik uang (tunai) maupun barang, termasuk berbagai tunjangan yang diberikan seperti : iuran dan jaminan sosial, iuran dana pensiun, asuransi kecelakaan, tabungan hari tua. Data diperoleh dari pencatatan belanja rutin pemerintah ditambah dengan perkiraan upah yang dibayarkan melalui belanja pembangunan.
- iii. ***Penyusutan barang modal*** ; merupakan perkiraan imputasi atas nilai penyisihan barang modal (kapital) pemerintah karena menurunnya nilai kapital tersebut secara ekonomis. Angka penyusutan ini diperkirakan sebesar lima persen dari nilai pembentukan modal tetap pemerintah, baik untuk estimasi harga berlaku maupun harga konstan.

Transaksi penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan jasa dan penerimaan hasil produksi barang. Beberapa penerimaan jasa harus dikeluarkan dari penghitungan komponen konsumsi akhir pemerintah. Jenis penerimaan yang di maksud adalah :

- i. **Penerimaan jasa**; yaitu penerimaan dari aktivitas jasa layanan pemerintah yang diberikan pada masyarakat, yang terdiri dari :
 - Penerimaan pendidikan

- Penerimaan dari rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya
- Penjualan karcis masuk ke tempat hiburan (yang diusahakan pemerintah)
- Penerimaan jasa tenaga kerja dan pekerjaan
- Penerimaan proyek
- Penerimaan 50 persen dari sewa, penggantian benda tidak bergerak dan benda bergerak
- Penerimaan 50 persen dari penerimaan bukan pajak luar negeri
- Penerimaan 40 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat

ii. Penerimaan hasil produksi barang; yaitu penerimaan dari penjualan berbagai barang yang diproduksi oleh unit pemerintahan umum, yang terdiri dari :

- Penjualan hasil pertanian/perkebunan
- Penjualan hasil peternakan
- Penjualan hasil perikanan
- Penjualan hasil obat-obatan, vaksinasi, dan farmasi lainnya
- Penerimaan penggantian dokumen pelanggan
- Penjualan penerbitan, potret, film, poster, gambar dan peta
- Penerimaan hasil penjualan air minum dari proyek pembangunan
- Penerimaan 50 persen dari sewa, penggantian benda tidak bergerak dan benda bergerak
- Penerimaan 20 persen dari penerimaan lain-lain pada penerimaan bukan pajak pemerintah pusat

Data penerimaan pemerintah pusat diperoleh dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada rincian penerimaan bukan pajak. Sedangkan data

penerimaan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) diperoleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (BPS) pada rincian penerimaan dari produksi barang dan jasa.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah adalah hasil pencatatan administrasi pemerintah yang tersedia secara rutin dan bersinambung. Untuk pengeluaran pemerintah pusat digunakan data realisasi belanja rutin dan pembangunan APBN yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) diperoleh dari Survei Keuangan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa), yang diselenggarakan BPS. Dari data di atas, diperoleh nilai pengeluaran konsumsi pemerintah adh Berlaku. Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan cara sbb :

- i. Mendeflasi nilai belanja barang adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tanpa ekspor sebagai deflator, sbb :

$$\frac{\text{nilai belanja barang adh berlaku}}{\text{IHPB (tanpa ekspor)}}$$

- ii. Mengekstrapolasi belanja pegawai dengan menggunakan indeks jumlah pegawai negeri sipil sebagai ekstrapolator, sbb :

$$\text{nilai belanja pegawai} \times \text{indeks jumlah pegawai}$$

- iii. Penyusutan diperhitungkan sebesar 5 persen dari total PMTB pemerintah
iv. Penerimaan penjualan jasa dan barang lainnya diperoleh dengan mengalikan rasio penerimaan adh Konstan dengan total penerimaan

5.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencakup perolehan barang modal oleh berbagai sektor institusi (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) yang ada di dalam wilayah ekonomi domestik pada kurun waktu tertentu. Barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi ini, dapat berasal dari produksi dalam negeri atau domestik maupun dari impor.

a. Konsep dan Definisi

Pembentukan modal tetap bruto diartikan sebagai nilai pengadaan, pembuatan, maupun pembelian atas barang modal dikurangi nilai pelepasan barang modal yang serupa selama kurun waktu satu tahun atau satu triwulan. Barang modal yang dimaksud mencakup barang modal baru yang berasal dari domestik, maupun barang modal baru dan barang modal bekas dari luar negeri atau impor. Termasuk pembuatan dan perbaikan besar barang modal yang menyebabkan bertambahnya umur pemakaian atau kapasitas produksi dari barang tersebut.

Barang modal tersebut dinilai dengan harga pembelian, di mana di dalamnya sudah termasuk nilai margin perdagangan, biaya pengangkutan, dan biaya lain yang terkait dengan alih kepemilikan barang modal tersebut. Harga pembelian bisa dalam bentuk harga produsen, atau harga pedagang, atau harga kesepakatan loko gudang pembeli.

Secara garis besar, pembentukan modal tetap bruto dibedakan atas pembentukan modal dalam bentuk bangunan dan bukan bangunan. Barang modal bangunan, dirinci menurut bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal), mesin dan perlengkapan, alat angkut, serta barang modal lainnya. Selain barang modal dalam bentuk bangunan, barang modal lain dapat dibedakan lagi menurut barang modal domestik dan barang modal impor (luar negeri).

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Metoda yang digunakan dalam menghitung pembentukan modal tetap bruto adalah pendekatan arus barang (*commodity flow approach*), yaitu dengan cara memperhitungkan proporsi nilai penyediaan barang modal (*supply*) yang menjadi bagian dari pembentukan modal, pada waktu yang bersamaan. Khusus barang modal yang berbentuk mesin dan perlengkapannya dapat berasal dari produk domestik maupun dari impor.

Estimasi nilai pembentukan modal dalam bentuk bangunan (konstruksi) diperoleh dengan cara mengalikan besaran rasio tertentu terhadap nilai output sektor konstruksi (domestik) yang menjadi bagian dari pembentukan modal. Dalam praktek, tidak semua output bangunan akan menjadi pembentukan modal, karena ada sebagian dari output tersebut yang menjadi biaya antara pada aktivitas produksi sektor lain. Secara prinsip, estimasi nilai pembentukan modal tetap dilakukan melalui penghitungan *adh Konstan* dulu, yaitu dengan teknik ekstrapolasi, yang kemudian di “reflasi”, atau dikalikan dengan indeks harga tertentu. Selain itu dapat dilakukan melalui penghitungan *adh Berlaku* dulu, untuk selanjutnya di “deflasi” dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

Secara umum, penghitungan nilai pembentukan barang modal *adh Konstan* dilakukan dengan metoda ekstrapolasi, atau mengalikan nilai *adh Konstan* 2000 dengan indeks kuantumnya. Nilai pembentukan modal dalam bentuk mesin dan alat perlengkapan domestik dihitung dengan cara ekstrapolasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan indeks produksi tertimbang menurut kelompok jenis barang modal, yang dibedakan dalam klasifikasi 5 (lima) digit KLUI. Nilai *adh Berlaku*-nya diperoleh dengan cara mereflasi nilai *adh Konstan* 2000 dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) tertimbang, disesuaikan dengan kelompok jenis barang modalnya

Nilai pembentukan modal berupa mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor, juga diperoleh dengan cara ekstrapolasi, yaitu menggunakan indeks kuantum barang impor sebagai ekstrapolator. Indeks tersebut dihitung dengan formula :

$$IQ_t = \frac{\sum Q_t P_o}{\sum Q_{t-1} P_o} \times 100\%$$

di mana Iq_t : Indeks kuantum tahun t
 Q_t : kuantum pada tahun t
 Q_{t-1} : Kuantum pada tahun t-1
 P_o : Harga per unit pada tahun 2000

Nilai adh Berlaku-nyadiperoleh dengan me"reflasi" nilai adh Konstan dengan indeks harga perdagangan besar barang impor, sesuai dengan kelompok barang modalnya.

Data yang digunakan di dalam penghitungan pembentukan modal tetap bruto antara lain diperoleh dari :

- i. Sub-direktorat Neraca Barang BPS, berupa output bangunan (konstruksi), baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2000
- ii. Sub-direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang BPS, berupa indeks produksi industri menurut 5 digit kode KLUI, baik triwulanan maupun tahunan
- iii. Sub-direktorat Statistik Harga Perdagangan Besar BPS, berupa indeks harga perdagangan besar (IHPB).
- iv. Sub-direktorat Statistik Impor BPS, berupa data kuantum (volume) serta nilai barang impor menurut SITC.

5.4 Perubahan Inventori

Data tentang nilai perubahan inventori dalam komponen penggunaan PDB, mencakup dua komponen, yaitu perubahan nilai inventori (*changes in inventory*) dan diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*). Namun, nilai perubahan inventori pada series data PDB Konstan 2000, sudah dihitung secara tersendiri atau terpisah. Sedangkan nilai diskrepansi diperoleh dengan cara mengurangkan total PDB sisi sektoral (lapangan usaha) dengan total PDB sisi penggunaan. Perbedaan hasil estimasi antara PDB sektoral dengan PDB penggunaan, di antaranya disebabkan oleh i) pendekatan basis pengukuran ii) ; lingkup atau cakupan iii) ; metoda estimasi iv) sumber data ; dan v) asumsi yang digunakan.

a. Konsep dan Definisi

Inventori diartikan sebagai persediaan barang jadi, barang setengah jadi, termasuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut dalam aktivitas produksi. Inventori merupakan bagian dari harta lancar yang dikuasai produsen, pedagang, konsumen maupun pemerintah. Menurut konsep, inventori merupakan bagian dari proses investasi. Untuk itu, inventori yang dikuasai oleh rumah tangga untuk keperluan konsumsi tidak diperhitungkan. Lebih lanjut, SNA mengkasifikasi inventori sebagai :

- i) persediaan barang yang ada di produsen untuk digunakan dalam proses produksi lebih lanjut, dijual, atau yang akan dikirim pada pihak lain;
- ii) persediaan barang dari pihak lain yang akan digunakan untuk konsumsi antara, atau dijual kembali tanpa ada proses lebih lanjut.

Dalam hal selisih atau diskrepansi statistik, nilai dari dua pendekatan PDB akan dibandingkan. PDB lapangan usaha menunjukkan hasil dari penjumlahan nilai tambah bruto seluruh sektor ekonomi. Sedangkan PDB penggunaan menunjukkan hasil dari penjumlahan seluruh komponen permintaan akhir, setelah dikurangi dengan impor.

Komponen permintaan akhir tersebut meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, serta ekspor. Jadi komponen perubahan inventori (dengan status residual) ini akan menjadi satu-satunya komponen PDB yang mempunyai 2 (dua) tanda, bisa positif atau negatif. Diskrepansi statistik akan bertanda “**positif**” bila nilai PDB sisi sektoral lebih besar dari nilai PDB sisi penggunaan, atau sebaliknya.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Dua pendekatan digunakan dalam penghitungan perubahan inventori, yaitu pendekatan komoditi dan pendekatan perusahaan (korporasi). Pendekatan komoditi (tidak langsung) adalah dengan menghitung perubahan inventori menurut jenis komoditi, terutama produk perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan; Sedangkan pendekatan perusahaan (langsung) digunakan untuk menghitung perubahan inventori pada industri pengolahan.

Pendekatan Komoditi

Disebut juga sebagai pendekatan arus komoditas. Nilai perubahan inventori adh Konstan 2000 dihitung dengan mengalikan perubahan volume inventori (merupakan hasil pengurangan dari posisi pada akhir tahun tertentu dengan posisi pada akhir tahun sebelumnya) dengan harga di tahun dasar. Nilai perubahan inventori adh Berlaku dihitung dengan mengalikan volume tersebut dengan harga pada tahun bersangkutan.

Pendekatan Perusahaan

Pendekatan perusahaan dilakukan karena data dari hasil Survei industri besar sedang (IBS) maupun dari Laporan keuangan perusahaan terbuka, merupakan data posisi inventori adh pasar. Data dari hasil survei IBS berupa bahan baku dan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nilai posisi dideflasi dengan indeks harga

perdagangan besar (IHPB), sehingga diperoleh nilai posisi inventori adh Konstan 2000. Dengan mengurangi nilai posisi inventori pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, akan diperoleh nilai perubahan inventori adh Konstan. Nilai perubahan inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara mereflasi nilai perubahan inventori adh Konstan 2000 dengan IHPB yang sesuai.

Data dasar untuk penghitungan inventori diperoleh dari Statistik Perkebunan, Statistik Kehutanan, Statistik Pertambangan & Penggalian, Statistik Industri Besar-Sedang, Dirjen Peternakan, dan Bursa Efek Indonesia (untuk perusahaan yang terbuka (*go public*)). Sedangkan data indeks harga diperoleh dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

5.5 Ekspor/Impor Barang dan Jasa

Ekspor dan impor merupakan aktivitas perdagangan barang dan jasa produk domestik dengan pihak di luar negeri. Secara konsep, transaksi ini terjadi antara pihak “residen” dengan “non-residen”. Transaksi ekspor akan menambah devisa, sebaliknya transaksi impor akan mengurangi devisa negara. Dalam penghitungan PDB, barang dan jasa yang berasal dari impor bukan merupakan bagian dari output domestik. Untuk itu nilai impor harus dikurangkan dari PDB.

a. Konsep dan Definisi

Ekspor dan Impor merupakan aktivitas perdagangan barang dan jasa antara penduduk³⁷ Indonesia dengan penduduk negara lain. Dalam transaksi ekspor, termasuk pembelian langsung penduduk negara lain atas barang dan jasa di wilayah domestik, seperti pembelian barang dan jasa oleh wisatawan asing di wilayah Indonesia. Begitu

³⁷ Menggunakan konsep “residen”

pula sebaliknya, pembelian langsung barang dan jasa di luar negeri oleh penduduk Indonesia dikategorikan sebagai impor. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ekspor dan impor adalah transaksi perdagangan dengan pihak luar negeri (*external transaction*) baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Barang ekspor maupun barang impor dibedakan menurut kriteria yang berbeda. Barang ekspor digolongkan menurut kelompok : minyak bumi dan bukan-minyak bumi, sementara barang impor menurut kelompok barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Sedangkan ekspor dan impor jasa dibedakan atas : jasa pengangkutan, jasa asuransi, jasa komunikasi, pariwisata, pemerintahan dan jasa lainnya.

Ekspor dan impor³⁸ barang dinilai menurut harga *Free on Board* (FOB)³⁹. Sementara data ekspor dan impor yang diperoleh dari Subdit Statistik Ekspor maupun Subdit Statistik Impor masih dalam kurs dolar Amerika (\$ US), sehingga nilai tersebut perlu dikonversikan ke dalam satuan rupiah. Untuk ekspor konversinya menggunakan rata-rata kurs “beli” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi ekspor bulanan. Sedangkan impor konversinya menggunakan rata-rata kurs “jual” dolar AS yang ditimbang dengan nilai nominal transaksi impor bulanan. Hasil estimasi nilai ekspor maupun impor barang dan jasa yang telah dikonversi dalam satuan rupiah, merupakan nilai transaksi ekspor dan impor *adh Berlaku*.

Untuk menghitung nilai ekspor dan impor *adh Konstan*, dibedakan antara produk dalam bentuk barang dan produk jasa. Untuk produk barang diperoleh dengan cara mendeflasi nilai ekspor atau impor *adh Berlaku* dengan indeks harga per-unit (IHPU) masing-masing kelompok barang ekspor maupun impor. Sedangkan untuk

38 Konsep sebelumnya menurut harga CIF (*Cost Insurance and Freight*)

39 Harga diatas kapal, tidak termasuk biaya angkut, premi asuransi dan biaya pelabuhan lainnya

produk jasa diperoleh dengan cara membagi nilai ekspor atau impor adh Berlaku dengan indeks harga per-unit barang ekspor dan barang impor yang dikombinasi dengan indeks implisit jasa-jasa terseleksi.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi nilai ekspor dan impor, selain dari BPS, juga dari Bank Indonesia (BI). Untuk nilai ekspor maupun nilai impor barang, data yang digunakan bersumber dari BPS, sedangkan ekspor dan impor jasa bersumber dari BI.

5.6 Penyusutan (Depresiasi)

Penyusutan merupakan bagian dari biaya produksi, yang menjelaskan tentang berkurangnya nilai barang modal secara ekonomi. Penyusutan bukan faktor pendapatan sehingga harus dikeluarkan dari penghitungan PDB.

a. Konsep dan Definisi

Penyusutan merupakan pengurangan nilai barang modal dalam suatu periode akuntansi. Pengurangan atau susutnya nilai barang modal (kapital) bisa secara ekonomis maupun teknis, karena digunakan dalam suatu proses produksi. Agar supaya nilai aset kembali pada posisi semula, maka harus dilakukan pengembalian barang modal melalui penyisihan nilai kapital ausnya nilai barang modal dalam proses produksi. Nilai susut ini kemudian disebut sebagai depresiasi (*consumption of fixed capital*). Di sisi lain, penyusutan yang merupakan tabungan di perusahaan akan menjadi salah satu sumber pembiayaan investasi fisiknya.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Penyusutan diperhitungkan dari nilai PMTB, atau dari nilai barang modal yang ada (stok kapital). Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa usia pakai barang modal antar jenis sangatlah bervariasi, yakni antara 3 s.d 60 tahun. Rasio nilai penyusutan setiap

tahun diasumsikan sama besar, atau menggunakan proporsi yang sama antar tahun. Untuk itu, digunakan rata-rata penyusutan sekitar 5 persen dari total nilai PDB. Umumnya, penghitungan penyusutan perusahaan di Indonesia menggunakan metoda “garis lurus”, atau mengikuti pola dan struktur barang modal pada masing-masing tahun, meskipun secara empiris, penyusutan sangat dipengaruhi oleh faktor “usia” serta “usai” pemakaian masing-masing barang modal.

5.7 Pajak Tidak Langsung (*neto*)

Pajak merupakan kewajiban pembayaran perusahaan maupun rumah tangga (masyarakat) pada pemerintah. Di sisi lain, pajak akan menjadi bagian dari penerimaan pemerintah. Hanya pajak tidak langsung dan subsidi (*current transaction*) yang terkait dengan perangkat PDB, sedangkan pajak langsung akan dicakup pada komponen yang lain. *Pajak tidak langsung neto* adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi.

a. Konsep dan Definisi

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi oleh unit usaha⁴⁰. Secara tidak langsung, pajak ini dibebankan pada konsumen melalui harga produk yang dijual (dibeli konsumen). Pajak tidak langsung dan subsidi merupakan unsur yang mempunyai transaksi berlawanan. Pajak tidak langsung merupakan penerimaan pemerintah dari masyarakat, sedangkan subsidi merupakan bantuan (transfer) yang diberikan pemerintah pada masyarakat.

b. Metode Penghitungan dan Sumber Data

Informasi tentang pajak tidak langsung dapat diperoleh dari laporan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

⁴⁰ Secara langsung pajak tersebut dibayarkan oleh perusahaan

5.8 Pendapatan atas Faktor Produksi dari Luar Negeri

Komponen ini merupakan sumber atau bagian dari pendapatan masyarakat domestik, yang secara spesifik menggambarkan tentang aliran transaksi dalam bentuk pendapatan faktorial dari luar negeri dan/atau sebaliknya. Pendapatan faktor produksi merupakan pendapatan yang ditimbulkan karena adanya kepemilikan faktor-faktor produksi di suatu negara, seperti lahan (*land*), modal (*capital*), tenaga kerja (*labor*), serta manajemen (*entrepreneur*). Faktor produksi tersebut digunakan oleh wilayah/negara lain (*non-residen*) sehingga menimbulkan aliran devisa ke dalam negeri. *Pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh Indonesia dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi yang berada di wilayah domestik yang faktornya dimiliki oleh luar negeri (*non-residen*).

a. Definisi konsep

Pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri merupakan penerimaan atau balas jasa faktor produksi tenaga kerja maupun bukan tenaga kerja (modal/kapital), serta faktor atau harta kepemilikan lain. Pendapatan dari faktor produksi tenaga kerja berupa kompensasi tenaga kerja berupa upah dan gaji, serta tunjangan lain. Sedangkan pendapatan faktor bukan-tenaga kerja mencakup kompensasi dalam bentuk bunga, deviden, royalti, dan sejenisnya. Transaksi tersebut sering diartikan juga sebagai pendapatan dari investasi. Dengan demikian maka *pendapatan neto atas faktor produksi terhadap luar negeri* merupakan selisih pendapatan atas faktor produksi dari luar wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki Indonesia) dikurangi pendapatan faktor produksi yang berada di wilayah domestik (yang faktor produksinya dimiliki luar negeri atau *non-residen*).

b. Metoda Penghitungan dan Sumber Data

Nilai pendapatan “neto” luar negeri atas faktor produksi tenaga kerja maupun bukan-tenaga kerja diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US \$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk pendapatan faktor produksi yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan menggunakan kurs ekspor, sedangkan pendapatan faktor produksi ke luar negeri dikonversikan dengan menggunakan kurs impor. Hasil penghitungan tersebut merupakan estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Berlaku.

Perkiraan pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Konstan dihitung dengan cara deflasi, yaitu dengan membagi estimasi pendapatan atas faktor produksi dari luar negeri adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai. Indeks yang digunakan adalah indeks harga per-unit impor dan indeks harga per-unit ekspor.

5.9 Transfer Berjalan (*Current Transfer*)

Merupakan komponen yang akan menjadi koreksi bagi nilai PDB maupun Pendapatan Nasional, yang sifatnya bisa menambah atau bisa pula mengurangi. Untuk memperoleh pendapatan disposabel maka pendapatan nasional harus dikurangi dengan transfer berjalan.

a. Konsep dan Definisi

Transfer merupakan proses pendistribusian (pengalokasian) kembali pendapatan faktor yang dimiliki oleh berbagai institusi pada pihak lain secara cuma-cuma, tanpa ada suatu ikatan. Transfer dapat pula diartikan sebagai pemberian yang bersifat tidak wajib

sebagai suatu proses redistribusi pendapatan masyarakat yang dilatar-belakangi oleh alasan sosial. Transfer yang dimaksud adalah transfer berjalan (*current transfer*), yang umumnya berupa pemberian hibah atau sumbangan untuk bencana alam, pendidikan, kesehatan dsb.

b. Metoda Penghitungan dan Sumber data

Nilai transfer "*neto*" terhadap luar negeri diperoleh dari neraca pembayaran luar negeri (*Balance of Payment*) Bank Indonesia. Data yang diperoleh masih dalam satuan nilai dolar Amerika (US\$), sehingga harus dikonversi ke dalam nilai rupiah dengan menggunakan kurs nilai ekspor dan nilai impor rata-rata tertimbang. Untuk penerimaan transfer yang berasal dari luar negeri dikonversi dengan kurs ekspor, sedangkan untuk pembayaran transfer ke luar negeri dikonversi dengan kurs impor. Nilai hasil estimasi tersebut merupakan perkiraan nilai transfer adh Berlaku.

BAB VI

P E N U T U P

1. PDB menurut penggunaan tahun 2008 s.d 2013 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDB penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDB penggunaan terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga (termasuk lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDB penggunaan. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2008 s.d 2013, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDB menurut penggunaan, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro

lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, pendapatan faktorial neto (*factorial income*) dari luar negeri, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

DAFTAR ISTILAH

Domestik

Merupakan batas teritori aktivitas ekonomi, yang hampir mendekati konsep wilayah teritori negara secara hukum (batas administrasi). Istilah domestik merupakan terminologi baku yang digunakan di dalam penyusunan statistik neraca nasional yang memberikan batasan yang jelas tentang kawasan ekonomi penduduk, baik residen maupun non-residen.

Ekspor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh transfer dan penjualan barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, yang berlangsung baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam praktek, ekspor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang keluar melalui batas pabean atau wilayah domestik suatu negara, termasuk pembelian langsung di negara tersebut oleh non-residen. Karena ekspor barang dagangan dinilai *adh FOB (free on board)*, maka nilai ekspor tidak termasuk biaya angkut dan asuransi sampai ke negara tujuan.

Ekonomi domestik

Merupakan aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam batas wilayah domestik suatu negara. Ekonomi domestik dibedakan dengan luar negeri (*rest of the world*) karena konsep "residen", bukan karena unsur kebangsaan atau mata uang. Ekonomi domestik mencakup aktivitas ekonomi yang diselenggarakan oleh residen. Konsep ini tidak selalu identik dengan batas wilayah administrasi secara politik.

Faktor Produksi

Mencakup faktor yang terlibat dalam aktivitas produksi, baik langsung maupun tidak langsung, seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan.

Faktor Pendapatan dari Luar Negeri

Merupakan pendapatan atau kompensasi yang diterima oleh pemilik atau penguasa faktor produksi, karena terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar batas wilayah domestik.

Harga Berlaku

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun berjalan.

Harga Konstan

Penilaian atas barang dan jasa (produk) yang dihasilkan atau dikonsumsi, dengan menggunakan tingkat harga pada tahun dasar tertentu.

Impor Barang dan Jasa

Mencakup seluruh transfer atau pembelian barang dan jasa dari residen suatu negara ke residen negara lain, baik berlangsung di dalam wilayah domestik suatu negara maupun di luar negeri. Dalam praktek, impor terdiri dari barang dagangan dan barang lain yang melewati batas pabean, termasuk pembelian langsung oleh residen di luar negeri. Barang dagangan impor dinilai adh CIF (*cost insurance fraid*), sehingga nilai barang tersebut termasuk biaya angkut dan asuransi.

Pembentukan Modal Tetap

Mencakup pembuatan dan pembelian barang modal baru, baik dari dalam maupun luar negeri (impor), termasuk barang modal bekas dari luar negeri. Pembentukan modal tetap yang dicatat hanya yang dilakukan oleh residen (unit ekonomi domestik) suatu negara/wilayah.

Penyusutan

Merupakan nilai susut suatu barang modal tetap, karena digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Antara

Merupakan permintaan barang dan jasa yang digunakan di dalam proses produksi.

Permintaan Akhir

Merupakan permintaan atas barang dan jasa, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, pembentukan modal, maupun ekspor.

Produk

Merupakan output yang dihasilkan melalui proses produksi yang dilakukan oleh

produsen (residen) di dalam batas wilayah domestik suatu negara, pada kurun waktu tertentu. Berbagai jenis produk (disebut juga sebagai komoditas), menurut sifatnya dibedakan atas barang (*good/tangible*) dan jasa (*service/intangible*).

Produk domestik

Merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di dalam sistem ekonomi domestik, setelah memperhitungkan barang dan jasa yang berasal dari impor. Total penyediaan (*supply*) barang dan jasa di dalam suatu perekonomian dapat berasal dari produk domestik maupun impor.

Residen

Merupakan unit ekonomi yang punya pusat kepentingan ekonomi di dalam batas wilayah suatu negara (*centre of economic interest*). Peran penting ini ditandai oleh dua faktor penting, yaitu tempat tinggal (*dwelling*) dan tempat aktivitas ekonomi, dalam jangka waktu yang relatif panjang, biasanya setahun. Tujuannya untuk membedakan batas teritori suatu negara dari negara lain (*rest of the world*). Unit ekonomi yang bukan residen suatu negara, dianggap sebagai sektor luar negeri (*non-residen*).

Tahun Dasar

Merupakan tahun yang dipilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan di tahun yang lain. Melalui tahun dasar dapat digambarkan series data dengan indikator rinci tentang perubahan atau pergerakan yang terjadi.

Wilayah ekonomi

Merupakan wilayah geografi yang secara administrasi dikelola suatu pemerintahan (negara), di mana manusia, barang dan modal bebas berpindah, yang mencakup wilayah udara, darat maupun perairan. Wilayah ekonomi juga mencakup wilayah khusus seperti kedutaan, konsulat dan pangkalan militer, serta zona bebas aktif (lepas pantai).

YAYASAN
PUSAT PENELITIAN DAN
KEMAJUAN ILMU
KOMUNIKASI
& MEDIA

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri, berbagai seri*, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.

18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50*, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76*, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993

L a m p i r a n

YAYASAN UNIVERSITAS
Negeri Semarang

UIN Ar-Raniry
Jember

TABEL 1. PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BJRLAKU (MILIAR RUPIAH)
TABLE 1. EXPENDITURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES (BILLION RUPIAHS)

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Private Consumption Expenditure</i>	856.798,3	1.039.655,0	1.231.964,5	1.372.078,0	1.532.888,3	1.785.596,4	2.092.655,7	2.510.503,8	2.999.956,9	3.290.995,9	3.643.425,0	4.053.363,6	4.496.373,4	5.071.094,4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	90.779,7	113.416,1	132.218,8	163.701,4	191.055,6	224.980,5	288.079,9	329.760,1	416.866,7	537.588,8	587.282,9	669.000,6	733.269,4	827.242,8
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	275.881,2	323.875,3	353.967,0	392.788,6	515.381,2	655.854,3	805.786,1	985.627,1	1.370.717,0	1.744.357,1	2.064.994,1	2.370.273,0	2.688.883,5	2.876.253,2
4. a. Perubahan Inventori <i>a. Changes in Inventories</i>	33.282,8	47.193,6	35.979,5	122.681,9	36.911,1	39.974,6	42.382,2	-1.053,3	5.822,3	-7.264,2	18.364,4	70.774,2	170.309,6	179.778,1
b. Diskrepansi Statistik <i>b. Statistical Discrepancy</i>	-13.144,5	-13.986,5	-46.995,0	-185.355,1	-87.673,3	-47.163,0	-70.415,7	-33.647,0	103.108,5	-116.790,9	24.732,0	151.025,2	269.075,0	310.913,8
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Export of Goods and Services</i>	569.490,3	642.594,7	595.514,0	613.720,8	739.639,3	945.121,8	1.036.316,5	1.162.973,8	1.475.119,1	1.354.409,4	1.584.673,8	1.955.821,0	1.999.254,0	2.156.808,6
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less Import of Goods and Services</i>	423.317,9	506.426,2	480.815,4	465.940,9	632.376,1	830.083,4	855.587,8	1.003.271,3	1.422.902,1	1.197.092,7	1.476.620,3	1.851.070,4	2.127.725,5	2.338.118,6
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO <i>GROSS DOMESTIC PRODUCT</i>	1.389.769,9	1.646.322,0	1.821.833,4	2.013.674,6	2.295.826,2	2.774.281,1	3.339.216,8	3.950.893,2	4.948.688,4	5.606.203,4	6.446.851,9	7.419.187,1	8.229.439,4	9.083.972,3
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi <i>Net Factor Income From Abroad</i>	-92.161,8	-61.051,2	-54.513,1	-77.413,9	-105.350,1	-135.000,5	-142.268,9	-162.484,7	-175.865,2	-196.219,5	-180.968,9	-216.892,7	-243.193,0	-281.096,8
9. PRODUK NASIONAL BRUTO <i>GROSS NATIONAL PRODUCT</i>	1.297.608,1	1.585.270,8	1.767.320,3	1.936.260,7	2.190.476,1	2.639.280,6	3.196.947,9	3.788.408,5	4.772.823,2	5.409.983,8	6.265.883,0	7.202.294,4	7.986.246,4	8.802.875,5
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto <i>Less Net Indirect Taxes</i>	-37.820,3	31.425,7	71.186,3	85.272,2	62.534,0	53.719,3	98.142,7	112.188,8	104.045,1	214.833,2	225.193,6	179.725,3	46.436,5	271.111,7
11. Dikurangi Penyusutan <i>Less Depreciation</i>	69.488,5	82.316,1	91.091,7	100.683,7	114.791,3	138.714,1	166.960,8	197.544,7	247.434,4	280.310,2	322.342,6	370.959,4	411.472,0	454.198,6
12. PENDAPATAN NASIONAL <i>NATIONAL INCOME</i>	1.265.939,9	1.471.529,0	1.605.042,3	1.750.304,8	2.013.150,8	2.446.847,2	2.931.844,3	3.478.675,0	4.421.343,7	4.914.840,5	5.718.346,9	6.651.609,7	7.528.338,0	8.077.565,2

* Angka sementara/*Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

TABEL 2. PENGGUNAAN PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (MILIAR RUPIAH)

TABLE 2. EXPENDITURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CONSTANT 2000 MARKET PRICES (BILLION RUPIAHS)

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Private Consumption Expenditure</i>	856.798,3	886.736,0	920.749,6	956.593,4	1.004.109,0	1.043.805,1	1.076.928,1	1.130.847,1	1.191.190,8	1.249.070,1	1.308.272,8	1.369.881,1	1.442.193,2	1.518.393,4
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	90.779,7	97.646,0	110.333,6	121.404,1	126.248,7	134.625,6	147.563,7	153.309,6	169.297,2	195.834,4	196.468,8	202.794,9	205.385,9	215.393,1
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	275.881,2	293.792,7	307.584,6	309.431,1	354.865,7	393.500,5	403.719,2	441.361,5	493.822,3	510.085,9	553.347,7	599.505,5	657.589,1	688.559,8
4. a. Perubahan Inventori <i>a. Changes in Inventories</i>	33.282,8	41.846,8	13.085,0	45.996,7	25.099,1	33.508,3	29.026,7	-243,1	2.170,4	-2.065,2	-604,4	9.033,5	50.371,4	53.767,6
b. Diskrepansi Statistik <i>b. Statistical Discrepancy</i>	-13.144,5	-11.767,2	9.546,6	-26.895,8	8.757,2	-8.535,4	16.237,9	54.186,8	27.039,9	2.205,3	13.823,4	4.419,3	22.732,8	-337,7
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Export of Goods and Services</i>	569.490,3	573.163,4	566.188,4	599.516,4	680.621,0	793.613,0	868.256,5	942.431,4	1.032.277,8	932.248,6	1.074.568,7	1.221.229,0	1.245.702,0	1.311.759,6
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less Import of Goods and Services</i>	423.317,9	441.012,0	422.271,4	428.874,6	543.183,8	639.701,9	694.605,3	757.566,2	833.342,2	708.528,8	831.418,3	942.297,3	1.005.036,0	1.017.190,8
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO <i>GROSS DOMESTIC PRODUCT</i>	1.389.769,9	1.440.405,7	1.505.216,4	1.577.171,3	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.126,7	1.964.327,3	2.082.456,1	2.178.850,3	2.314.458,8	2.464.566,1	2.618.938,4	2.770.345,1
8. Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri Atas Faktor Produksi <i>Net Factor Income From Abroad</i>	-92.161,8	-66.210,6	-56.357,0	-81.230,8	-80.468,1	-107.381,7	-113.857,5	-120.563,7	-96.595,5	-109.819,3	-92.992,0	-96.458,7	-100.655,9	-111.056,2
9. PRODUK NASIONAL BRUTO <i>GROSS NATIONAL PRODUCT</i>	1.297.608,1	1.374.195,1	1.448.859,4	1.495.940,5	1.576.048,7	1.643.433,5	1.733.269,2	1.843.763,6	1.985.860,6	2.069.031,1	2.221.466,8	2.368.107,4	2.518.282,5	2.659.288,9
10. Dikurangi Pajak Tidak Langsung Neto <i>Less Net Indirect Taxes</i>	-37.820,3	27.283,2	57.684,8	65.876,5	46.040,6	34.698,9	55.424,5	56.398,0	45.381,5	83.421,6	81.054,0	60.347,8	15.272,3	82.628,1
11. Dikurangi Penyusutan <i>Less Depreciation</i>	69.488,5	72.020,3	75.260,8	78.858,6	82.825,8	87.540,8	92.356,3	98.216,4	104.122,8	108.942,5	115.722,9	123.228,3	130.946,9	138.517,3
12. PENDAPATAN NASIONAL <i>NATIONAL INCOME</i>	1.265.939,9	1.274.891,6	1.315.913,8	1.351.205,4	1.447.182,2	1.521.193,8	1.585.488,4	1.689.149,3	1.836.356,3	1.876.667,0	2.024.689,9	2.184.531,3	2.372.063,3	2.438.143,5

* Angka sementara/ *Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures*

TABEL 3. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGUNAAN
TABLE 3. PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CURRENT MARKET PRICES BY EXPENDITURE

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Private Consumption Expenditure</i>	61,65	63,15	67,62	68,14	66,77	64,36	62,67	63,54	60,62	58,70	56,51	54,63	54,64	55,82
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	6,53	6,89	7,26	8,13	8,32	8,11	8,63	8,35	8,42	9,59	9,11	9,02	8,91	9,11
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	19,85	19,67	19,43	19,51	22,45	23,64	24,13	24,95	27,70	31,11	32,03	31,95	32,67	31,66
4. a. Perubahan Inventori <i>a. Changes in Inventories</i>	2,39	2,87	1,97	6,09	1,61	1,44	1,27	-0,03	0,12	-0,13	0,28	0,95	2,07	1,98
b. Diskrepani Statistik <i>b. Statistical Discrepancy</i>	-0,95	-0,85	-2,58	-9,20	-3,82	-1,70	-2,11	-0,85	2,08	-2,08	0,38	2,04	3,27	3,42
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Export of Goods and Services</i>	40,98	39,03	32,69	30,48	32,22	34,07	31,03	29,44	29,81	24,16	24,58	26,36	24,29	23,74
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less Import of Goods and Services</i>	30,46	30,76	26,39	23,14	27,54	29,92	25,62	25,39	28,75	21,35	22,90	24,95	25,86	25,74
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO <i>GROSS DOMESTIC PRODUCT</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/*Very preliminary figures*

TABEL 4. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT PENGGUNAAN
TABLE 4. PERCENTAGE DISTRIBUTION OF GROSS DOMESTIC PRODUCT AT CONSTANT 2000 MARKET PRICES BY EXPENDITURE

Jenis Pengeluaran <i>Type of Expenditure</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Private Consumption Expenditure</i>	61,65	61,56	61,17	60,65	60,62	59,62	58,30	57,57	57,20	57,33	56,53	55,58	55,07	54,81
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>General Government Consumption Expenditure</i>	6,53	6,78	7,33	7,70	7,62	7,69	7,99	7,80	8,13	8,99	8,49	8,23	7,84	7,77
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	19,85	20,40	20,43	19,62	21,42	22,48	21,86	22,47	23,71	23,41	23,91	24,32	25,11	24,85
4. a. Perubahan Inventori <i>a. Changes in Inventories</i>	2,39	2,91	0,87	2,92	1,52	1,91	1,57	-0,01	0,10	-0,09	-0,03	0,37	1,92	1,94
b. Diskrepansi Statistik <i>b. Statistical Discrepancy</i>	-0,95	-0,82	0,63	-1,71	0,53	-0,49	0,88	2,76	1,30	0,10	0,60	0,18	0,87	-0,01
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Export of Goods and Services</i>	40,98	39,79	37,62	38,01	41,09	45,33	47,01	47,98	49,57	42,79	46,43	49,55	47,57	47,35
6. Dikurangi Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less Import of Goods and Services</i>	30,46	30,62	28,05	27,19	32,79	36,54	37,60	38,57	40,02	32,52	35,92	38,23	38,38	36,72
7. PRODUK DOMESTIK BRUTO <i>GROSS DOMESTIC PRODUCT</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/ *Preliminary figures*

** Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpshq@bps.go.id

